



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS KOPERASI UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023**

PROVINSI GORONTALO



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jln. Tengah Desa Toto Selatan Kec. Kabila Kab. Bone Bolango. Provinsi Gorontalo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 800/DKUPP/SK/ 124 /I/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, perlu disusun Rencana Kerja OPD sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;

b. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 mengamanatkan Pemerintah Daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPD) dan Rencana Kerja perangkat daerah 2023-2026;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah, Penyusunan Renja-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;

d. bahwa Rencana Kerja dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan ;
11. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
14. Peraturan Gubernur Gorontalo No. 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo;
16. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023- 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023, dengan susunan tim seluruhnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai tugas:
1. Melakukan inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan sinkronisasi, pengolahan data dan informasi, menelaah dan menganalisis, penyesuaian dan penajaman, serta mengevaluasi bahan/materi perihal yang dibutuhkan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja);

2. Merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) sesuai tahapan dan tata cara dokumen rencana perangkat daerah berdasarkan kebijakan dan regulasi yang berlaku;
3. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

**KEPALA DINAS**

RISJON K. SUNGE
NIP. 196909241989021001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Gorontalo (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo (sebagai laporan)
4. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo
5. Inspektur Provinsi Gorontalo
6. Yang Bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : 800/DKUPP/SK/ 124 /I/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOPERASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

Pengarah/ Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Gorontalo

Tim Penyusun :

Ketua : Sekretaris Dinas

Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Koperasi
2. Kepala Bidang UKM
3. Kepala Bidang Perindustrian
4. Kepala Bidang Perdagangan
5. Kepala Balai UPTD BPSMB

Kelompok Kerja : 1. Kasubag Umum & Kepegawaian
2. Perencana Ahli Muda
3. Kepala Sub Bagian Keuangan
4. Pengawas Koperasi Ahli Muda
5. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
6. Pengawas Perdagangan Ahli Muda
7. Kasubag. Tata Usaha UTD BPSMB
8. Kasi. Jaminan Mutu
9. Kasi. Pelayanan Teknis
10. Pelaksana

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 28 Januari 2022



KEPALA DINAS

RISJON K. SUNGE

NIP. 196909241989021001



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini dapat diselesaikan

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023, RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini menjadi dasar penyusunan dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD.

Pada tahun 2023 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo melaksanakan 11 Program, 21 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yaitu terdiri program/kegiatan di Bidang Koperasi, Bidang UKM, Bidang Industri, Bidang Perdagangan, UPTD BPSMB dan Kesekretariatan. Pelaksanaan program dan kegiatan akan sangat tergantung pada komitmen kerja dan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal yang dibangun yang berdasar pada peraturan yang berlaku.



Kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Semoga pelaksanaan program dan kegiatan pada periode 2023 berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Gorontalo, Juli 2022

KEPALA DINAS

RISION SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 196909241989021001



DAFTAR ISI

<i>Uraian</i>	<i>Hal</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	50
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	52
2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023	56
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	63
Bab III Tujuan Sasaran Perangkat Daerah	68
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	73
3.3. Program dan Kegiatan	74
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	85
Bab V Penutup	86

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Program & Kegiatan beserta realisasi Keuangan Tahun 2021	9
Tabel 2.2.	Indikator Sasaran Diskumperindag Prov. Gorontalo Tahun 2020	12
Tabel 2.3.	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo	13
Tabel 2.4.	Data Perkembangan Koperasi 2018-2021	14
Tabel 2.5.	Data Keragaan Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2021	15
Tabel 2.6.	Data Perkembangan Usaha Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2021	16
Tabel 2.7.	Realisasi KUR Per Sektor Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2021	20
Tabel 2.8.	Rekap Data UMKM Tahun 2018-2020	23
Tabel 2.9.	Perkembangan IKM Tahun 2017 - 2021	26
Tabel 2.10.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	44
Tabel 2.11.	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	51
Tabel 2.12.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	61
Tabel 2.13.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	64
Tabel 3.1.	Perbandingan Jumlah Program Kegiatan dan Anggaran	75
Tabel 3.2.	Perbandingan Program Kegiatan dan Anggaran RKPD & Renja 2023	76
Tabel 3.3.	Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2023 dan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD 2026 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2023 ini merupakan penjabaran rencana strategis (renstra) tahun 2023-2026. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan kondisi Provinsi Gorontalo dimana masa jabatan Kepala Daerah akan berakhir di tahun 2022, maka sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada Tahun 2022, bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026 dan kemudian menyusun Rencana kerja perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Sebagaimana Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, bahwa Renstra PD Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana



strategis (renstra) tahun 2023-2026 Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. Peraturan Gubernur ini menyebutkan bahwa Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo;
6. Pengelolaan barang milik Negara/daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan Provinsi Gorontalo;
7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan.



Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Kumperindag diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta dengan sarana dan prasarana yang dimiliki.

Pada rancangan awal rencana kerja ini telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2021 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2022. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan baik di Gorontalo maupun nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan urusan pemberdayaan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.

Penyusunan Rancangan awal Renja PD dirumuskan mengacu pada Rancangan Awal RKPD tahun 2022, mempedomani Renstra PD 2023-2024, serta RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025. Rancangan Awal Renja PD juga mengacu pada permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, dan yang berasal dari usulan masyarakat.

Rancangan Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja OPD dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di OPD. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintahan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 Disamping itu, penyusunan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 juga memperhatikan dokumen perencanaan tahunan Kementerian/Lembaga dan SKPD Kabupaten/Kota, yang meliputi:

1. Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI 2020-2024;
2. Renstra Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020-2024; dan
3. Renstra Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024; serta
4. Renja SKPD Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo

Periode Keempat dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 - 2025, yaitu **Gorontalo**



Maju Dan Mandiri. Visi ini pada dasarnya meletakkan kemajuan dan kemandirian daerah sebagai indikator kesuksesan pembangunan yang menjamin terjadinya pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan (*quality-sustainable growth*).

Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai propinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan sistem hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas.

Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumberdaya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan keputusan dan tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka



- menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan.atau stabilitas sistem keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1491);
20. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Daerah
21. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03).



23. Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo tahun 2023-2024.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah :

1. Menjadi dasar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023.
2. Menjadi sarana untuk mengukur tingkat capaian sasaran program dan kegiatan SKPD dalam mendukung pencapaian sasaran RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dan Renstra Diskumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026.
3. Menjadi alat koordinasi, sinkronisasi dan penyelarasan prioritas dan sasaran program dan kegiatan lintas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat serta pelaku usaha, masyarakat, organisasi profesi, LSM, perguruan tinggi, lembaga donor selaku pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yang pada akhirnya diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Diskumperindag Provinsi Gorontalo yang tercantum dalam Renstra Diskumperindag periode 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kumperindag Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



- BAB I PENDAHULUAN, dalam Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD, yang meliputi Sub Bab *Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan* serta *Sistematika Penulisan*.
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021, Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022, yang dikaitkan dengan capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan beserta isu-isu yang melingkupi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, serta kajian terhadap rancangan awal RKPD dan telaah usulan program dan kegiatan masyarakat, Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD, yang meliputi Sub Bab *Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD* serta *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Bab ini diawali dengan kajian kebijakan nasional yang mempengaruhi pencapaian pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi SKPD, kajian terhadap isu-isu penting yang mendasari perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD, yang meliputi Sub Bab *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD* serta *Program dan Kegiatan*.
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD
- BAB V PENUTUP, Bab ini menguraikan catatan-catatan penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renja, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 yang menggambarkan arahan kebijakan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat gorontalo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada tahun 2021 Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan Provinsi Gorontalo setelah refocusing anggaran melaksanakan 11 program dan 17 kegiatan dengan Realisasi Fisik 99,21 % dan Realisasi Keuangan 96,14%. Adapun program dan kegiatan beserta realisasi keuangan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Program dan Kegiatan beserta Realisasi Keuangan Tahun 2021

NO	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Akhir 2021	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
A	BIDANG SEKRETARIAT		17.030.646.473	16.331.766.270	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.097.313.237	1.091.641.964	100
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.197.230.153	9.179.022.882	100
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.128.136	99.203.248	100
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	239.724.738	235.439.320	100
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.286.967.235	4.689.782.287	98
e.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.108.282.974	1.036.676.569	99



NO	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Akhir 2021	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
B.	BIDANG KOPERASI		2.785.437.938	2.783.389.700	100
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
a.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	130.017.849	129.824.850	100
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
b.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2.438.990.751	2.438.635.900	100
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
c.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	- Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	216.429.338	214.928.950	100
C	BIDANG UKM		660.299.219	641.534.890	100
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
a	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	- Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	199.999.549	197.009.550	99,04
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
b.	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	460.299.670	444.525.340	100
D	BIDANG INDUSTRI		1.973.825.423	1.740.013.827	80,00
VII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
a.	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	219.178.625	215.806.904	100
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	722.283.168	517.131.838	72.31



NO	Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Akhir 2021	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	667.657.038	660.940.533	100
		- Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	210.387.688	202.030.151	100
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
b.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	154.318.904	144.104.401	100
D	BIDANG PERDAGANGAN		3.205.759.495	3.168.265.973	100
IX	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
a.	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	- Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.295.493.553	2.294.046.137	100
II.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
b.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	- Pameran Dagang Internasional/Nasional	62.820.691	62.521.119	100
III.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
c.	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	362.148.412	329.080.539	99.04
d.	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	- Pengembangan Layanan Pengujian	285.234.702	284.018.478	100
		- Pengembangan Layanan Sertifikasi	138.196.457	136.734.100	100
e	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	61.865.680	61.865.600	100



Dari tabel 2.1 dapat disampaikan realisasi keuangan dari 11 program, 17 kegiatan, 22 sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 mencapai 96,14% dan realisasi fisik 99,21%. Realisasi fisik & Keuangan terendah ada pada program perencanaan & pembangunan industri, kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan realisasi fisik 72.31 % & 71,6% keuangan. Dengan sisa anggaran sebesar Rp. 205.151.330,- dari pagu Rp. 722.283.168,- (ketidakcapaian ini karena adanya item belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (Belanja Kemasan) sebesar Rp. 200.000.000, yang tidak terealisasi karena alasan teknis.

Sedangkan capaian tertinggi yaitu pada kegiatan Peningkatan kapasitas & pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen dengan realisasi fisik 100% dan keuangan mencapai 100% (silva Rp. 80).

Sedangkan indikator kinerja sasaran untuk urusan kumperindag, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 : Indikator Sasaran Diskumperindag Prov. Gorontalo
Tahun 2020

INDIKATOR SASARAN	2020		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
Persentase Koperasi Sehat	10%	30,03%	300.27%
Rata-Rata UKM Naik Kelas	50 UKM	64 UKM	150%
Jumlah Penumbuhan IKM	50 IKM	329 IKM	658%
Laju Inflasi Harga Terhadap Kemampuan Daya Beli Masyarakat*	2.15%	1.09%	50,70%
Persentase Barang Beredar Sesuai Ketentuan	90%	97,96%	108,8%

• *Hasil yang diperoleh berdasarkan kompilasi data yang diperoleh dari Badan Statistik Provinsi Gorontalo dan Dinas Kumperindag

Dari tabel 2.2 tersebut, dapat dijelaskan bahwa indikator sasaran Diskumperindag Provinsi Gorontalo rata-rata termasuk kategori baik diatas 100%.

Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebagai tahun keempat pelaksanaan RPJMD Tahun 2017 – 2022 dan perkiraan pelaksanaan program tahun berjalan



2021, menunjukkan adanya peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi pelaksanaan program tahun 2021 dan progres 2022 dilakukan terhadap indikator kinerja hasil program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2021 Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo

No	Program	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target	Realisasi
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	7 Dok	7 Dok
		Jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk dan dilatih	1 satgas (prov)	1 satgas (prov)
		Jumlah koperasi berprestasi & koperasi percontohan	10 Koperasi	10 Koperasi
		Jumlah pemeriksaan KSP/USP	10 Koperasi	10 Koperasi
2	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi Aktif	708 Kop	957 Kop
		Jumlah Koperasi berkualitas	10 Kop	10 Kop
		Jumlah Koperasi berprestasi	10 Kop	10 Kop
3.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi & UMKM yang Mengakses Permodalan	1250 KUKM	1250 KUKM
		Jumlah pelaksanaan sosialisasi kredit perbankan	12 kali	6 kali
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas	50 UKM	75 UKM
5	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas	50 UKM	75 UKM
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%
7	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang di bina	200 IKM	329 IKM
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Sistem Informasi IKM	1 Sistem Informasi	-
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Jumlah perdagangan antar pulau	3360 kali	3.808 kali
10	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditi Ekspor*	10 Komoditi	10 Komoditi
11	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang	3 sertifikat	-



Dari tabel 2.3 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada 11 (sebelas) program di tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan kecuali 2 (dua) program yaitu program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan indikator kinerja jumlah IKM yang dibina dan Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan indikator kinerja Jumlah Sertifikasi Mutu Barang. Ketidakcapaian atas target ini karena tidak ada permintaan sertifikat mutu barang dari para eksportir

Jumlah koperasi Aktif, Adapun target yang ditetapkan di akhir periode RPJMD sebanyak 728 koperasi aktif. Untuk jumlah koperasi aktif tahun 2021 sebanyak 957 koperasi dari target 708 koperasi. Adapun untuk capaian tahun 2020 adalah sebanyak 907 koperasi aktif dengan target sebanyak 693 Koperasi aktif. Jumlah koperasi aktif ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun data keragaan koperasi tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Data Perkembangan Koperasi 2018 - 2021

N O	U R A I A N	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Koperasi (Unit)	1.282	1.304	1.337	1387
	- Koperasi Aktif (unit)	840	866	907	957
	- Koperasi Tidak Aktif (unit)	442	438	430	430
	- RAT Koperasi (unit)	252	245	227	221
2.	Jumlah Anggota (Org)	140.874	138.627	140.296	142.713
3.	Total Asset (Rp. 000)	478.598.338	477.904.376	517.257.795	551.366.521
	- Modal Sendiri	230.562.545	230.906.015	269.839.272	306.039.971
	- Modal Luar	220.738.144	205.005.923	208.706.686	209.392.718
4.	Volume Usaha (Rp. 000)	375.350.749	370.439.880	398.344.178	414.931.109
5.	SHU (Rp. 000)	25.513.205	26.152.270	28.632.564	28.393.614

Sumber : Online Data System

Tahun 2021 persentase koperasi tidak aktif sebesar 31 persen terhadap total jumlah koperasi. Begitupun untuk koperasi yang telah melaksanakan RAT sebesar 23,72 persen terhadap jumlah koperasi aktif ditahun 2021. Untuk jumlah koperasi yang melaksanakan RAT ini mengalami penurunan dibanding tahun 2020. Terhadap hal ini telah dilakukan beberapa upaya antara lain melakukan revitalisasi koperasi dan pembinaan koperasi di kabupaten/Kota menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Di tahun 2021 revitalisasi koperasi berjumlah 5 (lima) koperasi yaitu :



- a. Kabupaten Gorontalo Utara : Koperasi Jasa Bobara Laut Jaya di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya
- b. Kabupaten Bone Bolango : Koperasi Produsen Putra Putri Lahay Desa Poduwoma Kecamatan Suwawa Timur
- c. Kabupaten Pohuwato : Koperasi Karya Bahari di Desa Lemito Kecmatan Lemito
- d. Kabupaten Boalemo : Koperasi Karya Tani Boalemo Kecamatan Paguyaman
- e. Kota Gorontalo : Koperasi Konsumen Anugerah Deheto mandiri.

Adapun untuk Jumlah koperasi aktif tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 50 Koperasi atau naik 3,7 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Adapun untuk pertumbuhan koperasi naik sebesar 3,7% dibandingkan tahun 2020. Untuk target akhir periode RPJMD sebanyak 728 koperasi aktif telah dapat dicapai. Untuk jumlah koperasi tidak aktif terbanyak terdapat di Kota Gorontalo sebanyak 146 koperasi atau sebesar 33,95 persen terhadap jumlah koperasi tidak se-Provinsi Gorontalo. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5. Data Keragaan Koperasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2021

No.	Kabupaten / Kota	Aktif (Unit)	Tidak Aktif (Unit)	Total Kop	Anggota (orang)			R A T (unit)	Tenaga Kerja
					L	P	Jlh		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KOTA GORONTALO	180	146	326	20413	20569	40982	88	478
2	KAB. GORONTALO	346	76	422	25489	18932	44421	64	1101
3	KAB. BOALEMO	92	61	153	9760	5483	15243	13	233
4	KAB. POHUWATO	101	37	138	6386	3657	10043	6	70
5	KAB. BONE BOLANGO	100	57	157	11467	5015	16322	25	283
6	KAB. GORONTALO UTARA	86	40	126	6303	5053	11356	16	214
7	PROV. GORONTALO	52	13	65	2740	1606	4346	9	144
	JUMLAH	957	430	1387	82558	60315	142713	221	2523

Sumber : Online Data System



Tabel 2.6. Data Perkembangan Usaha Koperasi Per Kabupaten/Kota
Tahun 2021

No	Kabupaten / Kota	Total Asset (Rp.000)	M. Sendiri (Rp 000)	M. LUAR (Rp. 000)	VOL USAHA (Rp. 000)	S H U (Rp 000)
1	2	16	17	18	19	20
1	KOTA GORONTALO	140.997.226	87.632.997	45.591.506	119.602.576	11.980.954
2	KAB. GORONTALO	204.601.981	126.908.632	77.723.349	183.778.549	7.620.574
3	KAB. BOALEMO	62.873.334	16.512.622	45.025.527	21.972.080	372.805
4	KAB. POHUWATO	28.435.409	3.965.369	5.542.099	17.377.580	735.237
5	KAB. BONE BOLANGO	58.736.300	29.429.852	20.591.855	37.708.800	4.882.115
6	KAB. GORONTALO UTARA	24.172.890	22.347.735	6.825.155	12.647.003	1.600.908
7	PROV. GORONTALO	31.549.381	19.242.764	8.093.227	21.844.521	1.201.021
	JUMLAH	551.366.521	306.039.971	209.392.718	414.931.109	28.393.614

Sumber : Online Data System

Dari sisi permodalan (modal sendiri) mengalami kenaikan sebesar 12,42% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah Rp. 269.839.272,- begitupun untuk jumlah asset mengalami kenaikan juga sebesar 6,6 persen dan untuk volume usaha mengalami kenaikan sebesar 4,2 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang berjumlah Rp. 398.344.178,-

Pada tahun 2020, upaya pemberdayaan Koperasi dilakukan melalui pembinaan kepada Pengurus, Pengawas Koperasi serta Koperasi pegelola dan anggota Koperasi serta Kegiatan Revitalisasi Koperasi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Penguatan SDM Bagi Koperasi yang tidak sehat / tidak Aktif sehingga bisa menjadi koperasi yang aktif berupa revitalisasi koperasi. Dimana pada tahun 2021 telah melakukan upaya revitalisasi 5 (lima) koperasi
- b. Pembinaan kepada Pengurus, Pengawas Koperasi serta Koperasi pegelola dan anggota Koperasi dan revitalisasi koperasi :
 - ~ Kota Gorontalo dilaksanakan Pembinaan dan penyuluhan perkoperasian tahun 2021 sebanyak 1 kali pelaksanaan dengan jumlah peserta 60 orang pengurus, pengelola koperasi yang ditingkatkan pemahamannya tentang perkoperasian.
 - ~ Kabupaten Gorontalo dilaksanakan pembinaan kepada Pengurus, Pengawas dan Pengelola serta anggota Koperasi dengan jumlah peserta 50 orang peserta dan *revitalisasi* pada Koperasi Konsumen



- Serba Usaha Bintang Jamur di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai.
- ~ Kabupaten Boalemo dilaksanakan pembinaan kepada Koperasi Wanita Sehat Sejahtera di Kecamatan Saripi dan *Revitalisasi* pada Koperasi Karya Tani Boalemo Kecamatan Paguyaman.
 - ~ Kabupaten Pohuwato dilaksanakan pembinaan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Membangun Hidup di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan dan *Revitalisasi* pada Koperasi Karya Bahari di Desa Lemito Kecamatan Lemito.
 - ~ Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan pembinaan kepada Koperasi Produsen Putra Putri Lahay Desa Poduwoma Kecamatan Suwawa Timur.
 - ~ Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan *Revitalisasi* pada Koperasi Jasa Bobara Laut Jaya di Desa Gentuma Kecamatan Gentuma Raya dan pembinaan pada Koperasi Perikanan Burung Laut di Desa Imana Kecamatan Atinggola
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi. Output kegiatan ini adalah pelaksanaan 13 diklat yang diikuti oleh 170 koperasi yang pesertanya dari pengurus, pengawas dan pengelola koperasi dengan jumlah 390 peserta yang terdiri dari IV (empat) angkatan yaitu :
- ~ Angkatan I Pelaksanaan Tanggal 5 s.d 8 April 2021
 1. Diklat Penilaian Kesehatan Koperasi : 30 peserta
 2. Diklat Restrukturisasi Usaha Koperasi : 30 peserta
 3. Diklat Kompetensi Bagi Juru Buku Koperasi : 30 peserta
 4. Diklat Permodalan Koperasi : 30 peserta
 - ~ Angkatan II Pelaksanaan Tanggal 29 Juni 2021 s.d 2 Juli 2021
 1. Diklat Dasar Perkoperasian : 30 peserta
 2. Diklat Akuntansi Koperasi (I) : 30 peserta
 3. Diklat Manajemen Perkoperasian : 30 peserta
 - ~ Angkatan III Pelaksanaan Tanggal 18 s.d 21 September 2021
 1. Diklat Mekanisme Penyelenggaraan : 30 peserta
 2. Diklat Kewirausahaan Koperasi : 30 peserta
 3. Diklat Akuntansi Koperasi (II) : 30 peserta
 - ~ Angkatan IV Pelaksanaan 21 s.d 24 September 2021
 1. Diklat Akuntansi Koperasi Berbasis IT : 30 peserta
 2. Diklat Pengawasan Koperasi : 30 peserta



3. Diklat Akuntansi Koperasi III : 30 peserta

d. Tersedianya database koperasi (keragaan koperasi) dan Online Data System (ODS) yang up to date untuk mengetahui perkembangan koperasi.

Diharapkan ditahun 2022 **Jumlah koperasi aktif** terus mengalami peningkatan melalui upaya revitalisasi koperasi dan pembinaan terhadap koperasi di Kabupaten/Kota.

Koperasi Berprestasi, pada tahun 2021 target kegiatan ini tercapai sebanyak 10 koperasi berprestasi. Di tahun 2020 target terhadap koperasi berprestasi ini tidak tercapai yaitu 0 koperasi hal ini karena adanya refocusing anggaran ditahun 2020. Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian kinerja kegiatan tahun 2021 yaitu antara lain :

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Primer Provinsi Gorontalo dan koperasi yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota sebagai koperasi pengecer pupuk bersubsidi yaitu di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara & kabupten Bone Bolango
- b. Rapat Ekspose Hasil Pengawasan Koperasi untuk menghasilkan laporan hasil pengawasan koperasi Se-Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta sebanyak 38 orang yang membahas masalah internal dalam kelembagaan koperasi antara lain data yang tidak valid, izin usaha simpan pinjam, izin pembukaan kantor cabang, koperasi yang tidak melaksanakan RAT, belum memiliki peraturan khusus SOM/SOP
- c. Penilaian Koperasi Berprestasi, untuk menghasilkan 10 koperasi sehat dan berprestasi Se-Provinsi Gorontalo dan sebagai penerima penghargaan koperasi berprestasi yaitu:
 - ~ KUD Hikmat, Jl. Bengawan Solo, Kel. Molosifat U. Kec. Sipatana. Kota Gorontalo
 - ~ KPRI “Harapan” Atinggoa (UKM Mart h) Jl. Trans Sulawesi Desa Kota Jin. Kec. Atinggola. Kab. Gorontalo Utara
 - ~ Kopwan Sejahtera, Jl. Beringin. Kel. Buladu. Kec. Kota Barat. Kota Gorontalo
 - ~ KSU “Damai Sejahtera” Jl. Isimu Raya. Kec. Tibawa. Kab. Gorontalo



- ~ Kopwan Aisyiyah. Jl. Nani Wartabone. Kel. Limba B. Kec. Kota Selatan. Kota Gorontalo
- ~ KSU "Al-Muhajirin. Desa Marisa Selatan. Kec. Marisa. Kab. Pohuwato
- ~ KSP "Integritas" Jl. Trans Sulawesi Desa Kota Jin. Kec. Atinggola. Kab. Gorontalo Utara
- ~ KSU "Tunas Harapan. Kec. Paguyaman. Kab. Boalemo
- ~ KPRI "Sejahtera" Tapa. Desa Talumopatu. Kec. Tapa. Kab. Bone Bolango
- ~ KSU "Agroprima". Desa Iloheluma. Kec. Tilongkabila. Kab. Bone Bolango

Jumlah Koperasi & UMKM yang Mengakses Permodalan, pada kegiatan peningkatan akses permodalan dan efektivitas bagi KUKM maka Realisasi penyaluran KUR yang dapat dicapai sebesar 1250 KUKM dari target yang ditetapkan sebesar 1250 KUKM ditahun 2021, berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini antara lain dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Forum Koordinasi Akses Pembiayaan tahun 2021, dilaksanakan di 6 Kab/Kota se Provinsi Gorontalo dengan jumlah peserta 90 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi permasalahan terhadap Koperasi dan UKM dalam hal akses pembiayaan serta sebagai media koordinasi dan konsolidasi dengan Pihak Perbankan dan Pegadaian untuk mempercepat realisasi pinjaman melalui Program KUR, LPDB dan UMI.
- b. Rapat Koordinasi Permodalan tahun 2021, dilaksanakan di Provinsi Gorontalo sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 60 orang. Kegiatan ini sebagai media koordinasi dan konsolidasi antara Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo dengan Kab/Kota dalam rangka mencari solusi permasalahan terhadap akses pembiayaan
- c. kegiatan sosialisasi melalui iklan dan penyiaran di media (RRI dan Koran) dengan sumber dana APBD.

Adapun data perkembangan realisasi KUR tahun 2021 menurut Bank Indonesia.



Tabel 2.7. Realisasi KUR Per Sektor Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2021

No	Sektor Ekonomi	Realisasi KUR			
		2020		2021	
		Nilai	Debitur	Nilai	Debitur
		(Rp .000)		(Rp .000)	
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	247.838.580	11.438	436.478.452	18.285
2	Perikanan	31.199.850	1.437	57.717.150	2.711
3	Industri Pengolahan	79.611.876	3.258	117.211.950	4.112
4	Konstruksi	107.000	5	755.000	9
5	Perdagangan Besar dan Ecer	252.145.592	10.518	577.785.868	20.094
6	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan	32.369.679	1200	52.643.000	1.604
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	19.271.900	992	25.779.000	1.284
8	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa	2.466.500	81	5.506.000	205
9	Jasa Pendidikan	420.000	7	70.000	2
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.712.000	97	3.467.000	71
11	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dll	57.380.400	2.534	96.947.000	3.870
TOTAL		726.523.377	31.567	1.374.360.420	52.247

Sumber : Data SIKP, Kementerian Keuangan

Dalam mencapai target kegiatan pada urusan koperasi ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian target tersebut antara lain :

- a. Makin banyaknya KUMKM yang memiliki usaha yang bankable (layak dari sisi usaha untuk didanai bank) sehingga kepercayaan bank terhadap KUMKM juga meningkat.
- b. Membaiknya kinerja Tim Fasilitasi KUR yang dibentuk oleh Pemprov Gorontalo dalam rangka sosialisasi, pendampingan/fasilitasi serta penyelesaian masalah KUMKM dalam mengakses KUR
- c. Terjalinnya koordinasi yang baik antara Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dengan BI dan Bank Pelaksana di daerah dalam rangka penyaluran dan monitoring evaluasi KUR.
- d. Makin baiknya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan kabupaten/kota.
- e. Meningkatnya kesadaran pengurus dan pengawas untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan manajemen usaha koperasi, yang ditandai dengan makin meningkatnya jumlah koperasi yang menerapkan manajemen usaha modern, sistem akuntansi serta komputerisasi dan internet (IT) ditengah pandemic covid-19.



- f. Adanya dukungan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana dekonstrasi sehingga dapat membantu pencapaian target kegiatan tahun anggaran 2021

Dibalik upaya pencapaian kinerja sasaran serta program dan kegiatan tersebut diatas, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain :

1. Pandemic Covid-19 berdampak pada pelaksanaan kegiatan pada urusan koperasi UKM. Anggaran pelaksanaan kegiatan direfocousing sehingga beberapa target kegiatan tidak dapat dicapai antara lain pelaksanaan RAT pada beberapa koperasi tidak dapat dilaksanakan tepat waktu sehingga dibutuhkan upaya yang keras untuk dapat dicapai di tahun berikutnya.
2. Rendahnya kualitas SDM pengelola koperasi UKM khususnya dalam penerapan regulasi perkoperasian yang diindikasikan oleh besarnya koperasi yang tidak aktif sehingga Secara umum kualitas SDM pengurus dan pengawas koperasi perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, pemasaran hasil dan pemanfaatan teknologi informasi.
3. Koordinasi antar sektor dalam hal pembinaan pengembangan dan pemberdayaan KUKM belum optimal, SDM pengelola koperasi sangat terbatas menyebabkan realisasi pelaksanaan RAT koperasi masih sangat rendah,
4. Masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif mengakibatkan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian menjadi kurang optimal.
5. Permasalahan internal koperasi yang sering menjadi penyebab tidak berjalannya roda organisasi adalah perselisihan antar pengurus dan pengawas, sehinga mengakibatkan tingkat pelayanan kepada anggota rendah, bahkan bisa berakibat tidak aktifnya koperasi.
6. KUR merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu koperasi dan UMKM yang usahanya layak untuk dibiayai tetapi memiliki keterbatasan modal, sehingga perlu diberikan modal hingga batas tertentu tanpa agunan. Namun pada kenyataannya, mekanisme perbankan yang mengharuskan adanya jaminan/agunan menyebabkan KUMKM sulit untuk bisa mengakses KUR.
7. Sulitnya mendapatkan data penerima KUR *by name by address* dari pihak perbankan, sehingga Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan



SKPD kabupaten/kota sulit untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat keberhasilan UMKM setelah menerima KUR.

Jumlah UKM Yang Dibina/Naik Kelas, pada tahun 2021 target UKM yang dibina sebanyak 50 UKM dan realisasinya mencapai 75 UKM (150 persen). pencapaian ini dilakukan antara lain dengan memaksimalkan kinerja konsultan PLUT melalui pendampingan UMKM naik kelas melalui kegiatan kelas bisnis UMKM, pelatihan dan pendampingan yang offline maupun dilaksanakan secara online.

Kegiatan lainnya yang dilaksanakan ditahun 2021 untuk mendukung ketercapaian target ini antara lain :

- a. Kegiatan Bimtek OSS (online Submission System) yang diikuti oleh 75 UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo pada bulan Maret, April dan Juni tahun 2021
- b. Bantuan Bahan Produksi bagi UMK pasca SHAT berupa bahan produksi pada Bulan Juli tahun 2021 bagi 3 UKM yaitu 2 UKM olahan pangan di kabupaten Bone Bolango (UKM Bubeya Berkah Desa Bube Kecamatan Suwawa, UKM Ranaya Bakery Desa Dutohe, Kecamatan Suwawa) dan 1 UKM di Kota Gorontalo desa Sipatana (UKM Dumalo). Total anggaran Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

Kegiatan umkm naik kelas ini ini bertujuan untuk memperkuat peran daerah dalam memberdayakan UMKM di daerahnya sesuai dengan amanat PP 38/2007, meningkatkan keterjangkauan UMKM pada layanan pengembangan usaha, meningkatkan jumlah dan perluasan usaha umkm, mendukung peningkatan produktivias dan daya saing UMKM.

Jumlah Produk UKM/IKM yang Dipromosikan/dipasarkan di Dalam dan Luar Daerah, pada tahun 2021 targetnya sebesar 20 produk UKM/IKM dengan tingkat capaian 100 persen. pencapaian ini dilakukan antara lain dengan memaksimalkan pada beberapa kegiatan antara lain :

- a. Kegiatan Pembinaan UKM Naik Kelas pelaksanaan yaitu Workshop yang di ikuti oleh 50 UKM dari kabupaten kota se Provinsi Gorontalo pada bulan Maret, April dan Mei tahun 2021
- b. Kegiatan Bisnis Kelas bagi UKM yang diikuti oleh 75 UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo pada bulan Maret, April dan Mei tahun 2021



- c. Kegiatan Promosi Produk UKM yang diikuti oleh 50 UKM Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo pada bulan Maret tahun 2021
- d. Pemberian bantuan kepada UMK Naik kelas berupa Bahan produksi pada bulan Juli tahun 2021 bagi 35 UKM olahan pangan di 6 Kabupaten/Kota total anggaran Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - ~ Kota Gorontalo (11 orang)
 - ~ Kabupaten Gorontalo (10 orang)
 - ~ Kabupaten Bone Bolango (3 orang)
 - ~ Kabupaten Pohuwato (4 orang)
 - ~ Kabupaten Boalemo (4 orang)
 - ~ Kabupaten Gorontalo Utara (3 orang)
- e. Bantuan produk kerajinan dan olahan pangan untuk galley UMKM di Bandara Hasanuddin Makassar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Adapun perkembangan Jumlah UKM tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Rekap Data UMKM Tahun 2018 – 2020
Per Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

WILAYAH	2018			2019			2020		
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH
KAB. GORONTALO	33.158	382	8	33.202	422	13	43.124	422	13
KOTA GORONTALO	8.598	2.642	400	8.770	2692	400	11,415	2,692	400
KAB. GORONTALO UTARA	3.447	213	13	3.492	213	15	5475	213	15
KAB. POHUWATO	6.390	240	107	6600	240	104	10.684	240	104
KAB. BOALEMO	5.718	142	85	6.368	103	99	10227	1499	202
KAB. BONE BOLANGO	2.776	11	5	4.689	112	5	7862	205	37
JUMLAH	60.087	3.630	618	63.121	3.782	636	88.787	5.271	771

Sumber : Bidang UKM Diskumperindag Provinsi Gorontalo

Dalam 3 tahun terakhir pertumbuhan UMKM di Provinsi Gorontalo mencapai 47,40%, Perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan



peningkatan produktifitas, daya saing usaha dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil.

Perkembangan jumlah UMKM belum diikuti dengan peningkatan produktifitas, daya saing usaha dan permodalan, sehingga UMKM di Gorontalo cenderung rentan dengan gejolak dan tekanan ekonomi, terlebih jika ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Pada prinsipnya, perkembangan kuantitas KUMKM belum dibarengi dengan perkembangan kualitas yang dapat memberi nilai tambah yang besar bagi pelaku usaha. Hal ini disebabkan KUMKM Provinsi Gorontalo belum didukung sepenuhnya dengan permodalan yang memadai, teknologi tepat guna, dan promosi produk untuk pemasaran yang efektif serta belum didukung oleh kemitraan dalam bentuk inti-plasma, subkontrak, waralaba (*franchise*), distribusi dan keagenan, perdagangan umum, dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya, seperti usaha patungan (*joint venture*), bagi hasil.

Perkembangan UMKM ini harus terus dibarengi dengan berbagai upaya untuk peningkatan usaha para pelaku usaha UMKM, karena masih ada beberapa faktor yang harus diupayakan agar pencapaian target program akan lebih maksimal antara lain :

1. Peningkatan modal usaha, masih kurangnya modal usaha serta masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha kecil untuk memformalkan usahanya melalui pengurusan perijinan, dimana hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk bisa mengakses modal perbankan.
2. Perlunya peningkatan peran pendamping layanan usaha terpadu (PLUT) serta melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan bagi UKM/IKM melalui Kelas Bisnis UMKM, Pelatihan



dan Pendampingan walaupun dilaksanakan secara online di masa pandemic covid-19 serta menjadikan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo menjadi *crisis centre* UMKM terdampak covid-19

4. Dimasa pandemi covid-19, menuntut Pemerintah untuk melaksanakan program-program yang sifatnya untuk mengintervensi UMKM terdampak covid-19 seperti upaya pemulihan ekonomi antara lain Pemberian bantuan kepada UMK Naik kelas berupa Bahan produksi bagi 35 UKM olahan pangan.
5. Sinergitas program yang bersumber dari APBD dan APBN sangat penting sehingga proses pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM di Provinsi Gorontalo tetap berjalan dengan baik dan maksimal.
6. Kegiatan evaluasi terhadap peningkatan jumlah wira usaha baru dan jumlah Usaha Mikro kecil dan UKM Naik Kelas di Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan secara intensif.
7. Sinergitas Program dan Kegiatan antara APBN dan APBD lebih di tingkatkan sehingga semakin menunjang pembangunan di sektor Koperasi dan UKM

Untuk tahun 2022 ditargetkan jumlah UMKM yang dibina akan terus bertambah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program pengembangan UKM, antara lain melalui:

1. Pembinaan UMKM Naik Kelas
2. Kelas Bisnis UMKM untuk pengembangan desa wirausaha
3. Stimulan Bagi UMKM
4. Factory sharing bagi UKM
5. Bimtek OSS (online single submission) dan rakor asosiasi UMKM
6. Sinergitas Program dan Kegiatan antara APBN dan APBD lebih di tingkatkan sehingga semakin menunjang pembangunan di sektor Koperasi dan UKM
7. Peningkatan Peran pendamping KUKM dalam upaya meningkatkan produktifitas dan kemampuan para pelaku usaha.

Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan koperasi dan UMKM adalah penguatan peran KUKM, dan pelaku usaha lainnya, memacu pertumbuhan investasi didaerah (optimalisasi pelaksanaan PERDA tentang kemudahan investasi; peningkatan peran perbankan selaku *agent of development* guna penguatan modal usaha; kerjasama antar daerah untuk



promosi dan pemasaran produk dan peningkatan kerjasama perdagangan regional, nasional dan internasional.

Meningkatnya *Jumlah IKM Yang Dibina*, adapun persentase capaian indikator program pengembangan industri kecil menengah tahun 2021 sebesar 164,5% sebanyak 329 IKM. Pencapaian ini adalah selain dari dukungan dana APBD juga mendapat dukungan penyelenggaraan kegiatan melalui dana dekonsentrasi. Adapun capaian RPJMD sebanyak 15.555 IKM dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 15.139 IKM. pencapaian target ini selain dari APBD 2021 juga dari dukungan dana dekonsentrasi. Adapun jumlah 15555 IKM adalah merupakan akumulasi dari jumlah IKM sejak tahun 2017.

Kebijakan pembangunan perindustrian difokuskan pada peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Tabel 2.9. Perkembangan IKM Tahun 2017 – 2021

No.	URAIAN	JUMLAH				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	INDUSTRI KECIL MENENGAH	14.388	12.985	14.282	15.221	15.211
2	SENTRA IKM	563	-	-	-	39
3	JUMLAH TENAGA KERJA	35.526	31.283	34.971	35.727	25.855
4	NILAI INVESTASI (Rp.)	192.637.968	187.103.014	5.197.067.090	5.193.825.361	5.248.716.211
5	NILAI PRODUKSI (Rp.)	580.300.089	672.012.186	767.899.395	976.894.427	946.172.392

Sumber : Bidang Industri, Diskuperindag Prov. Gorontalo

Tabel diatas menunjukkan perkembangan IKM yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Selang tahun 2018 - 2021 pertumbuhan IKM naik sebesar 17,14%. Demikian halnya dengan jumlah tenaga kerja, nilai investasi dan nilai produksi menunjukkan peningkatan selang tahun 2018 hingga 2021.

Keberadaan IKM yang tetap bertahan dan tetap tumbuh walau dimasa pandemi covid-19 hal ini didukung oleh karena jaringan



pemasaran produk yang semakin luas, kebijakan pemerintah daerah yang makin berpihak terhadap IKM, antara lain penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis bagi IKM serta bantuan bahan bagi IKM khususnya IKM kerajinan dan kemasan serta fasilitasi perizinan bagi IKM pangan. Namun pelatihan dan bimbingan teknis ini masih sangat membutuhkan dukungan anggaran yang cukup, agar bisa mencakup lingkup yang lebih luas dalam pembinaan dan penumbuhan IKM.

Program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran penumbuhan industri kecil menengah adalah :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan penyediaan bahan baku untuk kebutuhan arang tampurung serta tersedianya tenaga pelayanan umum di KIAT. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun anggaran 2021 tidak dapat dilaksanakan akibat refocusing anggaran penanganan covid-19 antara lain 1 kali kegiatan revitalisasi alat/mesin di Kawasan Industri Agro terpadu (KIAT)

b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri

~ Workshop e-SMART dan E Katalog bagi IKM Pangan di Provinsi Gorontalo

~ Pengembangan Wira Usaha Baru (WUB) Pangan di Provinsi Gorontalo

~ Penguatan Jumlah Industri Kecil Menengah IKM dan Wira Usaha Baru (WUB) dalam bentuk Stimulan sebanyak 4 (empat IKM) berupa Dukungan bantuan pembuatan bangunan produksi, bantuan peralatan, bantuan pengu ruisan legalitas usaha dan bantuan listrik. Output dari kegiatan ini yaitu terciptanya Wirausaha Baru (WUB) Pangan yang mandiri dan professional.

~ Fasilitasi Halal Bagi IKM Pangan,

~ Fasilitasi Kemasan Bagi IKM Pangan



- c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - ~ Focus Group Discussion (FGD) Pengalihan Hak Paten Karawo
 - ~ Pelatihan Pengembangan WUB Kerajinan
 - ~ Pengembangan Dekranasda Provinsi Gorontalo
 - ~ Pembinaan dan Pendampingan IKM IKSAB
- d. Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
 - ~ Penguatan jumlah Industri Kecil Menengah IKM dan Wira Usaha Baru (WUB) dalam bentuk Stimulan sebanyak 4 (empat) IKM berupa Dukungan bantuan pembuatan bangunan produksi, bantuan peralatan, bantuan pengurusan legalitas usaha dan bantuan listrik.
 - ~ Pelatihan pembuatan tempurung

2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional :

- a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Output kegiatan ini adalah data informasi IKM.

kegiatan yang teranggarkan ditahun 2021 adalah Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Industri Daerah (RPIP) Provinsi Gorontalo. Dokumen RPIP di tahun 2021 dimaksud saat ini telah selesai disusun dan telah dalam tahapan fasilitasi atau proses koordinasi untuk mendapatkan rekomendasi Perda dari DPRD Provinsi dan Depdagri. Sementara untuk 1 sistem informasi IKM belum teranggarkan sehingga dibutuhkan upaya yang keras untuk tahun berikutnya.

Output kegiatan ini adalah:

- a. Finalisasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dengan pihak Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri cq. Ditjen Bangda untuk mendapatkan rekomendasi



teknis sebagai syarat pembahasan Ranperda di tingkat DPR Provinsi Gorontalo

- b. Sosialisasi RPIP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)

Kebijakan pembangunan bidang industri difokuskan pada peningkatan peran IKM dalam perekonomian daerah, dengan sasaran utamanya adalah peningkatan pertumbuhan IKM. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya. Untuk itu penting untuk mendorong pembangunan sektor industri yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM).

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja hasil tersebut antara lain:

1. Adanya dukungan dana dekonsentrasi dalam pembinaan dan pengembangan IKM
2. Tingkat koordinasi antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota terjalin dengan baik, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan.
3. Adanya semangat dan Upaya untuk mengembangkan produk kerajinan, logam dan produk pangan melalui peningkatan hasil pemasaran produk dan dukungan anggaran yang memadai untuk penyediaan bahan baku yang berkualitas dan upaya peningkatan kualitas SDM IKM melalui pelatihan/bimtek dan bantuan bahan dan peralatan.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain :

- a. Upaya untuk mendorong berkembangnya IKM di daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang besar dan disertai dengan upaya pembinaan dan pemberdayaan dari tingkat hulu (petani) hingga hilir (pasar).



- b. Sentra-sentra IKM membutuhkan dukungan penuh bahan baku dan bahan penolong, dimana hingga saat ini keterbatasan bahan baku/penolong masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian.
- c. Kemampuan teknis dan jumlah SDM yang sangat terbatas serta jiwa entrepreneur dan kreativitas yang masih kurang dalam mengembangkan usaha industri kecil menengah, serta kemampuan mengembangkan desain produk serta kemasan IKM yang masih lemah
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk penunjang pengembangan IKM, serta anggaran dalam membiayai program dan kegiatan pengembangan usaha IKM juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha IKM di daerah termasuk usaha kerajinan di Provinsi Gorontalo.
- e. Sistem informasi data IKM yang belum tersedia, sehingga untuk memperoleh data IKM sangat sulit. Di tahun 2021 data perkembangan IKM adalah bersumber dari Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi dalam penyajiannya terdapat perbedaan dalam mendata IKM. untuk di Kabupaten Gorontalo Utara data yang disampaikan adalah jumlah IKM yang telah memiliki legalitas sementara IKM yang belum berlegalitas tidak terdata sehingga jumlah IKM yang disampaikan tidak sesuai dengan jumlah IKM yang masuk dalam binaan Provinsi Gorontalo.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana (mekanisasi) pendukung pengembangan industri kecil menengah serta terbatasnya kemampuan teknis, desain, produk, kemasan maupun perizinan bagi IKM
- g. Industri ekonomi Gorontalo masih didominasi oleh industri rumah tangga, industri kecil dan menengah

Untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama dan kolaborasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah serta sektor swasta dalam mendorong perkembangan IKM di daerah, serta terbentuknya UPT pengembangan produk dan kemasan di Provinsi Gorontalo

Jumlah Perdagangan Antar Pulau, adapun capaian indikator program tahun 2021 sebesar 113,33%, yang dihasilkan dari pencapaian jumlah perdagangan antar pulau di tahun 2021 sebanyak 3808 kali dari target yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 3360 kali. Jumlah perdagangan antar pulau ini diperoleh dari data SIPAP (system informasi



perdagangan antar pulau) serta dukungan kegiatan dengan anggaran dekonsentrasi.

Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam perdagangan antar pulau antara lain:

1. Komoditi yang di antarpulaukan melalui angkutan darat tidak dapat diawasi dengan baik. Selama ini data antar pulau hanya berdasarkan data Bongkat Muat Pelabuhan. Padahal banyak komoditi yang diangkut melalui darat tujuan Makassar dan Manado yang tidak dapat diawasi dengan baik.
2. Kewenangan untuk system resi gudang sudah menjadi kewenangan kabupaten kota sebagai pemilik gudang.
3. Keterbatasan sarana distribusi barang berupa pasar di Gorontalo. Hingga tahun 2021, jumlah pasar tradisional di Gorontalo baru 133 unit dan 14 unit pasar modern, dimana baik dari sisi jumlah, daya tampung, dan kondisi fasilitasnya masih sangat terbatas, sementara untuk pengembangan distribusi barang dan jasa sudah tidak menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (sesuai UU no. 23 Tahun 2014)
4. monitoring perdagangan antar pulau termasuk dalam rekomendasi jangka panjang dari tim pengendali inflasi daerah (TPID), seiring dengan diterapkannya perdagangan bebas dan implementasi kerjasama antar daerah/provinsi.

Beberapa kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini antara lain meningkatnya Jumlah Operasi Pasar yaitu :

- a. Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi tahun 2021 ditargetkan sebanyak 17x di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk sekali pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi, ditargetkan dapat melayani 1000 kpm hingga 1500 kpm (Kelompok Penerima Manfaat). Dengan masih berlakunya kondisi darurat pandemik di Provinsi Gorontalo, Tercatat jumlah pelaksanaan Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi mencapai 25x pelaksanaan dan berhasil melayani masyarakat sebanyak 30.260 kpm.

Pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di daerah dilakukan melalui Operasi Pasar/Pasar Kebutuhan Pokok Bersubsidi. Kegiatan ini dilakukan pada menjelang hari besar keagamaan (HBKN), saat adanya potensi kenaikan harga komoditi barang kebutuhan pokok dan kegiatan yang terkait pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat dan



bencana. Dengan menyediakan secara keseluruhan atau sebagian diantaranya yaitu komoditi antara lain beras, minyak goreng dalam kemasan, gula Kristal putih bukan rafinasi, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan atau barang kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

Outcome : memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan atau masyarakat miskin yang ada di Provinsi Gorontalo.

- b. Pelaksanaan kegiatan forum stabilisasi harga yang melibatkan stakeholder, distributor, dan retail modern, dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul fitri.

Jumlah Export, dengan tingkat capaian indikator program ini adalah sebanyak 10 komoditi dengan target 10 komoditi. (100%) adapun Jumlah komoditi ekspor untuk tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) komoditi produk ekspor yaitu Fytomaxx vegetable fruit, bungkil kelapa, ikan tuna, kepiting bakau, VCO, molase, Sozo formula manggata 1, kelapa parut, briket arang dan santan kelapa. dengan jumlah komoditi 40.588,418 Tondan nilai eksport \$ 20.123.200.

jumlah komoditi produk eksport yang dipromosikan sebanyak 3 komoditi dari target 9 komoditi (enceng gondok, bambu dan rotan)

Misi dagang eksport dan antar pulau target 1 misi dagang pada renstra, capaian tidak ada.

Jumlah UKM yang memahami prosedur export target renstra 20 calon ekportir, capaian 30 calon eksportir didukung oleh APBN

Faktor-faktor yang mendukung tingkat pencapaian target kinerja tersebut antara lain koordinasi lintas sektor dengan SKPD terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota serta dukungan pemerintah daerah untuk tetap mendorong semua pihak dalam meningkatkan ekspor Gorontalo hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian kerja sama MOU peningkatan ekspor antara Pemerintah Provinsi, Bank Indonesia, Bea Cukai, Pelindo dan Garuda Indonesia di tahun 2018.

Namun dibalik pencapaian target tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang perlu diantisipasi, antara lain :

- a. Pemahaman dan pengetahuan eksportir tentang prosedur, mekanisme dan standarisasi mutu barang ekspor-impor perlu terus ditingkatkan, seiring dengan dinamika kebijakan ekspor-impor baik nasional maupun negara tujuan ekspor.



- b. Produksi Jagung Gorontalo dan komoditi lainnya baik produktifitas maupun luas panen serta mutu produksi komoditi perlu ditingkatkan dalam rangka mendorong peningkatan ekspor daerah.
- c. Sarana Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek sebagai pintu gerbang ekspor perlu ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu melayani ekspor dan antar pulau secara cepat, efektif dan efisien dalam waktu bersamaan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan PT. Pelindo dan Administrasi Palayaran (Adpel) Gorontalo dalam mendukung peningkatan dan percepatan arus perdagangan antar pulau dan ekspor.
- e. Ekspor sangat tergantung pada tingkat permintaan pasar luar negeri, sehingga manakala terjadi krisis seperti pada akhir 2010 hingga 2011 maka akan berpengaruh terhadap volume ekspor daerah.
- f. Perlunya media informasi yang lebih cepat, murah dan mudah diakses sehingga akan memperlancar pemasaran dan *market intelegent* komoditi unggulan Gorontalo.
- g. Terbatasnya jaringan kerjasama antara para pelaku usaha UKM sebagai calon eksportir di daerah dan dukungan regulasi untuk biaya form ke semua tujuan ekspor sehingga memudahkan para eksportir dalam melaksanakan ekspor
- h. Membuka peluang bagi para UKM sebagai calon eksportir di Provinsi Gorontalo. dimana saat ini di siasati dengan menghubungi para calon eksportir yang bersedia melaksanakan ekspor untuk komoditi hasil laut, perkebunan dll. Sehingga sangat dibutuhkan dukungan penganggaran yang maksimal untuk pencapaian target promosi komoditi unggulan Provinsi Gorontalo.
- i. Mengupayakan kerjasama dengan direktorat perdagangan luar negeri untuk bisa mempertemukan eksportir walau hanya dalam virtual untuk membuka peluang ekspor seperti ke TimurTengah, jepang kota Narita. Dan juga adanya dukungan regulasi untuk biaya form ke semua tujuan ekspor sehingga memudahkan para eksportir dalam melaksanakan ekspor. Kemudian juga adanya kerjasama dari Maskapai Garuda yang membuka rute Manado-Narita dan Makassar – Singapura sehingga biaya ekspor lebih hemat 30 % dari biaya sebelumnya.



Jumlah Sertifikasi Mutu Barang, adapun persentase capaian indikator program tahun 2021 adalah 0 sertifikat (0 %) hal ini dikarenakan karena tidak ada permintaan sertifikat mutu barang dari para eksportir,

Program ini didukung oleh kegiatan :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Pengujian

Indikator kinerja **Jumlah Pengujian Standar Mutu Barang**, target 950 kali, capaian 692 kali (72,8%). Output kegiatan ini adalah :

- a. Jumlah pengujian komoditi sesuai standard mutu barang
- b. Pengambilan sampel komoditi di kabupaten/kota
- c. Penyediaan sarana/prasarana pengujian di laboratorium
- d. Pendataan pelaku usaha air minum isi ulang (damiu) di kabupaten/kota
- e. Peningkatan kompetensi PMB melalui pelatihan validasi metode dan estimasi ketidakpastian
- f. Partisipasi pada kegiatan Uji Banding antar Laboratorium, yaitu :
Uji banding yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Bandar Lampung pada tanggal 29 sd 31 Maret 2021, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi gabah dan beras.

Uji banding yang diselenggarakan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Bandar Lampung pada tanggal 08 sd 11 Desember 2021, dengan tujuan untuk memantau, menilai dan mengevaluasi kompetensi Laboratorium dalam bidang pengujian komoditi jagung dan biji kakao. Diantara 4 (empat) laboratorium, UPTD BPSMB Disperindag Provinsi Bali, UPTD BPSMB Provinsi Gorontalo, PT Beckjorindo Paryaweksana Lampung dan UPTD BPSMB Disperindag Lampung memperoleh hasil satisfactory (sangat memuaskan).

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi, dengan indikator kinerja **Jumlah Pelaku Usaha UKM yang Menerapkan Standar Mutu Barang**, target 30 pelaku usaha dengan capaian sebanyak 30 pelaku usaha.



Aktifitas yang mendukung pencapaian target ini meliputi:

- a. Jumlah UKM yang menerapkan standard
- b. Pengawasan mutu barang/komoditi ber-SNI di kabupaten/kota
- c. Sosialisasi penerapan standar produk melalui media cetak dan elektronik
- d. Surveillance laboratorium pengujian oleh Komite akreditasi Nasional
- e. Penyusunan/review dokumen sistem mutu Lembaga Sertifikasi Produk
- f. Pelatihan Audit Internal SNI ISO/IEC 19011 : 2018
- g. Melakukan Pra Audit dan kelayakan kesiapan akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk oleh tim auditor Badan Standardisasi Nasional
- f. Studi banding/komparasi lembaga sertifikasi produk di LSPro Baristan Kementrian Perindustrian di Sulawesi Utara

Keterbatasan anggaran untuk peralatan laboratorium pengujian mutu terbatas (UPTD BPSMB) belum sepenuhnya mampu melaksanakan pelayanan pengujian dan sertifikasi mutu barang pada beberapa komoditi karena belum memiliki peralatan yang memadai), keterbatasan sarana operasional sehingga pelayanan pengujian jarak jauh sering tidak terpenuhi dan kegiatan lainnya di UPTD BPSMB terkendala.

Beberapa hal yang menunjang pencapaian target kinerja ini antara lain

1. Makin efektifnya penyebaran informasi fungsi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dan sosialisasi standar mutu serta pentingnya sertifikasi mutu barang kepada pelaku usaha, khususnya eksportir dan pedagang antar pulau.
2. Terakreditasinya laboratorium BPSMB pada awal 2011 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga hingga saat ini laboratorium BPSMB terus mempertahankan akreditasi laboratorium sehingga bisa menerbitkan sertifikat mutu barang sebagai salah satu dokumen yang dipersyaratkan pada barang ekspor.
3. Ketersediaan Gedung Laboratorium di tahun 2021

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu segera diatasi antara lain :



- a. Minimnya sarana dan prasarana laboratorium pengujian mutu, sehingga pelayanan kepada pelanggan/konsumen tidak maksimal. UPTD BPSMB belum sepenuhnya mampu melaksanakan layanan pengujian dan sertifikasi mutu barang pada beberapa komoditi karena belum memiliki peralatan yang memadai seperti alat analisis laboratorium berupa *Atomic Absorption Spectrophotometer/AAS* dan *High Performance Liquid Chromatography/HPLC*, yang di tahun 2020 pengadaan alat-alat ini melalui DAK Kementerian Perdagangan RI di refocusing untuk penanganan covid-19).
- b. Minimnya sarana dan prasarana laboratorium pengujian mutu mengakibatkan sulitnya tenaga fungsional PMB untuk memperoleh angka kredit/poin pengujian sesuai dengan jenjang jabatannya (PMB Ahli).
- c. Minimnya sarana operasional sehingga pelayanan pengujian jarak jauh sering tidak terpenuhi

Sejak tahun 2020 pelaksanaan program peningkatan standarisasi mutu barang lebih diarahkan pada optimalisasi peran BPSMB dalam memfasilitasi pengujian dan sertifikasi mutu barang/produk unggulan Gorontalo, dan tidak hanya terbatas pada komoditi Jagung dan Rumput Laut, dan juga telah dilakukan penambahan 2 lingkup sertifikasi yakni biji Kakao dan Kopi serta penambahan pelayanan pengujian.

B. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen Indikator kinerja adalah Jumlah Pelaku Usaha Yang Diawasi.

Jumlah Pelaku Usaha yang diawasi, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,6 persen, target 110 pelaku usaha dengan capaian 125 pelaku usaha. yang diindikasikan dengan penanganan kasus pengaduan konsumen dan pengawasan secara berkala pada pelaku-pelaku usaha di Provinsi Gorontalo. Pengawasan barang beredar dan jasa serta pengawasan perdagangan di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo yang bersumber dari dana APBD dilakukan terhadap



pelaku usaha, pedagang, pengecer, distributor serta gudang-gudang.

Aktivitas yang mendukung pencapaian target ini yaitu :

- a. Pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Kabupaten Kota se Provinsi Gorontalo. yaitu antara lain :
 - Kasus Alat Ukur UTTP (liter/timbangan), sebanyak 25 kasus
 - SNI Wajib (mainan anak, kabel listrik, regulator)
 - Tanda daftar gudang
- b. Kegiatan sosialisasi perlindungan konsumen, yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Utara, Jumlah peserta 100 Peserta dari PKK, dharma wanita, karang taruna, pemuda, tokoh-tokoh agama dari kabupaten se Provinsi Gorontalo Tersosialisasinya Peraturan peraturan Perdagangan yang berlaku.
- c. Sosialisasi Permendag Nomor 35 tahun 2019 tentang pencantuman harga pada barang dengan di setiap kabupaten/kota pada saat pelaksanaan pengawasan barang/jasa.

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain Sarana dan prasarana pengawasan barang beredar masih sangat terbatas. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap ketentuan peraturan yang berlaku serta keterbatasan aparat pemda sebagai pengawas barang dan jasa serta pengawas perdagangan, begitupun Pengawasan Barang beredar dan/atau jasa serta Perdagangan harus lebih dioptimalkan dalam hal pembinaan sebab masih banyak pelaku usaha yang belum memahami peraturan-peraturan berlaku.

C. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen. Dengan Indikator Kinerja Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen.

Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen. Capaian di tahun 2021 sebesar 96 kasus dari target 60 kasus

Output kegiatan ini adalah :

- a. Penyelesaian pengaduan Sengketa Konsumen
- b. Sidang Penyelesaian sengketa Konsumen sebanyak 20 kali Sidang mengenai masalah Pembiayaan, yaitu



- BPSK Kabupaten Gorontalo ditahun 2021 melaksanakan 18 kali sidang yaitu menyelesaikan 6 pengaduan (1 pengaduan konsumen diselesaikan 3-4 kali pelaksanaan sidang) yaitu antara lain pengaduan penarikan kendaraan oleh pihak leasing, pinjaman KUR.
- BPSK Kota Gorontalo 8 kali Sidang.
Ditahun 2021 menerima 4 pengaduan konsumen. 2 diselesaikan melalui 6 kali sidang BPSK dan 2 kasus pengaduan konsumen setelah dilakukan 2 kali sidang oleh BPSK kemudian dilanjutkan ke pengadilan negeri.
- ~ BPSK Kabupaten Pohuwato, ditahun 2021 menerima 4 pengaduan konsumen tetapi tidak sampai pada sidang BPSK dan diselesaikan melalui mediasi yaitu antara lain kasus kadaluarsa barang, penarikan motor di leasing
- c. Pengaduan Konsumen yang di Mediasi sebanyak 76 pengaduan berupa Kadaluarsa, Harga pada barang, Harga barang dan harga pada barang berbeda. ukuran yang tidak sesuai.
- d. Kegiatan Pembentukan BPSK di 2 kabupaten yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato serta kota Gorontalo.
Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) masing-masing beranggotakan 9 (Sembilan) Orang anggota dan Sekretariat BPSK beranggotakan 3 (tiga) orang anggota .

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja tersebut antara lain makin efektifnya koordinasi lintas instansi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah.

Namun dibalik pencapaian target tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain Sarana dan prasarana pengawasan barang beredar masih sangat terbatas, seperti belum adanya kendaraan operasional khusus pengawasan barang dan belum adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten/kota menjadi penyebab belum optimalnya pelaksanaan fungsi perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan di daerah.



Persentase Peningkatan Layanan Jasa Administrasi, Penyediaan Sarana Prasarana dan SDM Aparatur, dengan realisasi tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100%, sesuai dengan yang ditargetkan. Ketercapaian indikator program ini didukung oleh ketercapaian target terhadap indikator :

Persentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag, dengan realisasi tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100%, yang diindikasikan dengan tercapainya target persentase pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD sebesar 100%.

Jumlah SDM Aparatur Yang Dilatih dengan realisasi tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 600%, yang diindikasikan dengan tercapainya target jumlah SDM aparatur yang dilatih dalam menunjang penyelenggaraan kewenangan dan tupoksi SKPD

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana SKPD, dengan tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar 100% yang diindikasikan dengan tercapainya target ketersediaan sarana dan prasarana SKPD yang mendukung penyelenggaraan kewenangan dan tupoksi SKPD sebesar 100%.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja program/kegiatan antara lain:

1. Membaiknya kinerja Sekretariat SKPD dalam mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pelayanan jasa administrasi perkantoran yang professional.
2. Meningkatnya pembinaan terhadap PNS yang mendorong peningkatan disiplin dan budaya kerja kearah yang lebih baik.
3. Tersedianya gedung kantor Dinas Kumperindag yang refresentatif melalui rehabilitasi kantor, pengadaan AC dan sarana prasarana lainnya.

Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan antara lain :

- a. Belum tersedianya sistem manajemen portofolio SDM aparatur SKPD, menyebabkan pemetaan dan distribusi SDM lingkup SKPD serta pemenuhan prosedur kenaikan pangkat dan gaji berkala belum optimal.



- b. Dukungan kendaraan operasional khususnya Roda Empat baik untuk mendukung pelaksanaan tugas SKPD.

Pada tahun 2021 program pelayanan administrasi perkantoran diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi secara cepat, efisien dan terukur, sehingga bisa menciptakan kepastian waktu dan kejelasan prosedur pelayanan dalam rangka pelayanan publik. Sedangkan untuk program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan SKPD.

Persentase pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi monitoring dan pelaporan, dengan tingkat capaian kinerja sasaran sebesar 100% yang diindikasikan dengan tercapainya target persentase pelaksanaan Perencanaan, Evaluasi monitoring dan pelaporan sebesar 100%.

Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh ketercapaian indikator kegiatan yaitu antara lain:

Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan, dengan realisasi tingkat capaian kinerja sebesar 50% yang diindikasikan dengan tercapainya target jumlah dokumen pelaporan keuangan sebanyak 1 dokumen laporan keuangan.

Beberapa faktor yang dapat menunjang pencapaian target kinerja tersebut antara lain

1. Membaiknya tata kelola keuangan SKPD yang ditandai dengan waktu pelayanan keuangan yang semakin cepat, efektif dan efisien.
2. Meningkatnya jumlah SDM keuangan yang mengikuti bimtek dan diklat bagi pengelola keuangan SKPD, yang ditandai dengan laporan keuangan tepat waktu dan pelayanan administrasi keuangan secara cepat dan akurat.
3. Penyempurnaan SIMDA oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Semakin intensifnya pembinaan dan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo telah mendorong terciptanya penyelenggaraan keuangan yang baik dan akuntabel.

Penyelenggaraan program dan kegiatan tahun 2021 tidak lepas dari program dan kegiatan serta alokasi anggaran, yang pada prinsipnya tetap difokuskan pada pencapaian indikator kinerja utama sasaran



pembangunan koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan perencanaan jangka menengah RPJMD 2017 – 2022, sehingga penyesuaian-penyesuaian arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, termasuk di sektor KUMKM, perindustrian dan perdagangan.

Sebagai bagian dari dinamika pembangunan daerah, maka perkembangan tuntutan dan kebutuhan daerah tersebut perlu direspon secara cepat, tepat dan terukur, agar dampak yang ditimbulkannya bisa memberikan *multiplier effect* terhadap hajat hidup orang banyak dan perekonomian daerah.

Jumlah Dokumen Perencanaan dan Koordinasi Lintas Sektor/SKPD/Pusat dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% yang diindikasikan dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan sebanyak 8 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan, melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat, antar SKPD provinsi dan kabupaten/kota.

Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD, dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% yang diindikasikan dengan ketersediaan jumlah dokumen monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD sebanyak 7 dokumen berupa Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2021, serta dokumen evaluasi berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2021 dan Laporan Monev Program, dengan persentase kenaikan sebesar 100%.

Beberapa faktor pendorong tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain :

- a. Membaiknya kualitas pelaksanaan rapat koordinasi dan Forum SKPD Tingkat Provinsi Gorontalo sebagai forum perencanaan bidang Kumperindag, yang diindikasikan dengan tingkat partisipasi stakeholder dalam forum perencanan dan pembahasan program dan kegiatan.
- b. Membaiknya kualitas koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota baik sehingga



tercipta sinergi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program/kegiatan.

- c. Kualitas koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah terus ditingkatkan sehingga diharapkan ada peningkatan terhadap alokasi anggaran Kementerian yang tersebar di 6 kabupaten/kota dan provinsi. serta DAK Non Fisik dari Kementerian Koperasi dan UKM RI yakni di khsususkan untuk Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM.

Namun demikian, masih ditemui beberapa permasalahan yang perlu dibahas dan solusi terbaik, antara lain :

- a. Keterbatasan anggaran tahun 2021 dan refocusing anggaran pandemic covid-19 menyebabkan banyaknya program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat belum terakomodir dalam DPA SKPD Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.
- b. Sesuai tupoksi Dinas Kumperindag menjalankan 3 kewenangan yakni Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Ditingkat pusat, ketiga kewenangan ini dilaksanakan oleh 3 Kementerian. Dengan perbandingan ini terlihat beban dan volume pekerjaan yang melekat pada Dinas Kumperindag sangat besar dan memerlukan sumberdaya yang besar pula untuk melaksanakannya. Beberapa dukungan sumberdaya yang diperlukan dalam rangka penguatan peran SKPD antara lain SDM, sarana prasarana kantor, ketersediaan kendaraan dinas operasional, dukungan pendanaan APBD dan APBN.
- c. Refocusing anggaran dampak pandemic Covid-19 menyebabkan target kinerja beberapa kegiatan tidak tercapai.

Untuk itu, pada tahun 2021 program peningkatan kualitas perencanaan bidang Kumperindag diarahkan untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan relevansi program dan kegiatan baik melalui forum perencanaan, Forum SKPD Tingkat Kabupaten/Kota, koordinasi ke pusat, antar provinsi dan lintas kabupaten/kota, lintas instansi, dan lintas pemangku kepentingan, sehingga kinerja hasil program dan output kegiatan bidang Kumperindag akan bisa mendorong pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017 – 2022.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja hasil program dan output kegiatan tahun 2021 dan progress 2022 diuraikan dalam *Tabel*



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo sebagai berikut.



Tabel 2.10. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2021
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan 2022 (RENJA OPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target		
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)						Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan		
						Target Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Renja OPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %	
1	2	3	4	5		6		7		8 (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	URUSAN KOPERASI & UKM													
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan jasa administrasi, penyediaan sarana prasarana dan SDM Aparatur	100%	100	%	100	%	100	%	100	100%	100	100	
	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Dinas Kumperindag	Persentase Pelayanan Jasa Adminsitirasi Perkantoran Dinas Kumperindag	100%	100	%	100	%	100	%	100	100%	100	100	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana SKPD	100%	100	%	100	%	100	%	100	100%	100	100	
	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	Jumlah SDM Aparatur yang di latih	33 ASN	17	ASN	20	ASN	20	ASN	100	20 ASN	20 ASN	100	
	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran UPTD BPSMB	Pesentase Pelayanan jasa administrasi kantor UPTD BPSMB	100%	100	%	100	%	100	%	100	100%	100	100	
	Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		100%	100	%	100	%	100	%	100	100%	100	100	
	Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program & Kegiatan	Jumlah dokumen Perencanaan dan Koordinasi lintas sektor/SKPD/Pusat	8 Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100	8 Dokumen	8 Dokumen	100	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan 2022 (RENJA OPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)						Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Renja OPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
		Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan SKPD	7 Dokumen Perencanaan	7	Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100	7 Dokumen	7 Dokumen	100
	Penatausahaan & Pelaporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	2 Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50	2 Dokumen	1 Dokumen	50
	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	- Jumlah Koperasi Aktif	728 Koperasi Aktif	907	Koperasi Aktif	708	Koperasi	957	Koperasi	135,17	708 Koperasi Aktif	907 Koperasi Aktif	125
		- Jumlah Koperasi berkualitas/	10 Kop. Berprestasi	0	Koperasi	10	Koperasi	10	Koperasi	100	10 Koperasi	22 Koperasi	220
		- Jumlah Koperasi berprestasi		0	Koperasi	10	Koperasi	10	Koperasi	100	10 Koperasi	22 Koperasi	220
	Penguatan SDM dan kelembagaan Koperasi	jumlah pengurus & pengelola koperasi yang ditingkatkan pemahamannya berkaitan dengan aturan/regulasi kelembagaan	690 pengurus dan pengelola koperasi yang dilatih	390	pengurus dan pengelola yang dilatih	150	pengurus dan pengelola yang dilatih	390	pengurus dan pengelola yang dilatih	260	150 pengurus dan pengelola yang dilatih	1.520 pengurus dan pengelola yang dilatih	220
		Jumlah Revitalisasi Koperasi	30 koperasi	1	Koperasi	10	Koperasi	5	Koperasi	50	10 Koperasi	11 Koperasi	36.6
	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	jumlah dokumen laporan hasil pengawasan	27 dokumen	42	Dokumen	7	Dokumen	7	dokumen	100	7 Dokumen	59 Dokumen	218,51
		jumlah satgas pengawas koperasi yang terbentuk & di latih	1 tim satgas (7 satgas)	7	satgas (provinsi)	1	satgas (provinsi)	1	satgas (provinsi)	100	1 tim Satgas (Provinsi)	1 Tim Satgas (Provinsi)	100
		jumlah koperasi berprestasi & Koperasi Percontohan	50 Koperasi	0	Koperasi	10	Koperasi	10	koperasi	100	10 Koperasi	22 Koperasi	44
		Jumlah pemeriksaan ksp/usp	30 koperasi	19		10	Koperasi	10	koperasi	100	10 Koperasi	29 Koperasi	96,6
	Peningkatan Akses Permodalan dan Efektifitas Pembiayaan Bagi KUKM	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses Permodalan	5000 KUKM	31,567	KUKM	1250	KUKM	1250	KUKM	100	1250 KUKM	67.752 KUKM	1355
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Kredit Perbankan	12 kali	0	Kali	12	Kali	6	Kali	50	-- kali	6 Kali	50



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan 2022 (RENJA OPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)						Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Renja OPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
	Pengembangan Layanan Usaha KUKM **	jumlah KUKM yang difasilitasi pendampingan usaha oleh PLUT KUKM	400 KUKM	0	KUMKM	0		0	KUMKM		0 KUKM	50 KUKM	12,5
	Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah UKM yang di bina/Naik Kelas	250 UKM	50	UKM	50	UKM	75	UKM	150	50 UKM	230 UKM	92
	Peningkatan SDM dan Penguatan Kelembagaan UKKM	jumlah UKM yang di tingkatkan pemahaman mengenai manajemen, pengelolaan, produktifitas dan pemasaran	850 UKM	0	UKM	150	UKM	75	UKM	50	150 UKM	320 UKM	37,64
			30 UKM yang dimagangkan	0	UKM Yang Dimagangkan	6	UKM Yang Dimagangkan	0	UKM Yang Dimagangkan	0	6 UKM Yang Dimagangkan	12 UKM Yang Dimagangkan	40
	Pembinaan UMKM Naik Kelas	Jumlah UMKM yang di bina	250 UKM	50	UKM	50	UKM	75	UKM	150	50 UKM	160 UKM	64
	Lomba Inovasi/UMKM Model dan Percontohan daerah	Jumlah UMKM Model/Percontohan		0	UKM Model	0	UKM Model	0	UKM Model	0	-	12 UKM Model	0
	Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UKM/IKM	Jumlah UKM /IKM yang mengikuti temu mitra	1000 UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	0	UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	0	UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	0	UKM/IKM yang mengikuti temu mitra	0	-	200 UKM/IKM	20
	Promosi dan Pemasaran Produk UMKM	Jumlah Produk UKM/IKM yang di Promosikan/dipasarkan di dalam & luar daerah	80 Produk UKM/IKM	15	produk UKM/IKM	20	produk UKM/IKM	20	produk UKM/IKM	100	20 produk UKM/IKM	60 produk UKM/IKM	75
	Pengembangan Usaha Layanan PLUT **	Jumlah KUKM yang difasilitasi pendampingan usaha oleh PLUT KUKM	400 KUKM										
	(keg. Menjadi sub kegiatan pada Keg Pembinaan UMKM Naik Kelas)												



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan 2022 (RENJA OPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)						Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Renja OPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian Realisas Target Renstra %
	URUSAN INDUSTRI												
	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM yang Dibina	15.339 IKM	15,226	IKM	200	IKM	167	IKM	83,5	15.139 IKM	15.139 IKM	98,7
	Pengembangan Agro Industri & Industri Pangan Daerah	jumlah IKM yang terampil tentang pengolahan pangan	140 IKM yang mendapat Bimtek/ Bantuan Pengolahan Pangan	100	IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	60	IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	64	IKM yang mendapat Bimtek Pengolaha n Pangan	106,67	30 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	240 IKM yang mendapat Bimtek Pengolahan Pangan	171,4
	Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka	Jumlah Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka yang dibina Penguasaan Teknologi	240 IKM KIMIA Kerajinan, Sandang dan Aneka yang Dibina	85	IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan	60	IKM yang mendapat Bimtek/bantuan Kerajinan	83	IKM yang mendapat Bimtek/ bantuan Kerajinan	138,33	60 IKM yang mendapat Bimtek/ bantuan Kerajinan	255 IKM yang mendapat Bimtek/ bantuan Kerajinan	106,25
	Pengembangan Agro Industri Terpadu	Jumlah Industri AgroTerpadu		-	Ton	- Ton	Ton	-	Ton		0 Ton	96,5 Ton	
	Pengembangan Industri Kerajinan Daerah	Jumlah IKM berbasis Industri Kerajinan		(Di Pindahkan ke keg Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka)		-	IKM yang mendapat bimtek/ bantuan kerajinan	(Di Pindahkan ke keg Pembinaan Teknologi Industri Kimia, Kerajinan, Sandang dan Aneka)					
	Pembinaan Teknologi Industri Logam dan Mesin	Jumlah IKM di bidang logam, mesin dan elektronik yang dibina penguasaan teknologi	120 IKM Logam mesin & Elektronik Yang Dibina	41	IKM Logam Mesin & Elektronik yang dibina	30	IKM Logam Mesin & Elektronik yang dibina	20	IKM Logam Mesin & Elektronik yang dibina	66,67	30 IKM Logam Mesin & Elektronik yang dibina	91 IKM Logam Mesin & Elektronik yang dibina	75,8
	Pengembangan Sistem Informasi IKM	Data Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	0	Sistem Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM	1	Sistem Informasi IKM	100	1 Sistem Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	100



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan 2022 (RENJA OPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)						Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Renja OPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
	Pengembangan Agro Industri Terpadu	Jumlah Industri Agro Terpadu	1 Industri Agro Terpadu	0	Industri Agro Terpadu	1	Industri Agro Terpadu	1	Industri Agro Terpadu	100	1 Industri Agro Terpadu	1 Industri Agro Terpadu	100
	URUSAN PERDAGANGAN												
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor daerah	Jumlah ekspor	12 Komoditi	13	Komoditi	10	Komoditi	10	Komoditi	100	10 Komoditi	38 Komoditi	316,6
	Promosi dan Pengembangan Produk Ekspor Daerah	Jumlah Komoditi produk ekspor yang dipromosikan	10 komoditi	13	Komoditi	9	Komoditi	3	Komoditi	33,33	9 /Komoditi	37 Komoditi	370
		Jumlah UKM yang Memahami Prosedur export	20 calon eksportir	-	calon eksportir	20	calon eksportir	30	calon eksportir	150	20 calon eksportir	20 calon eksportir	100
		Misi Dagang Ekspor dan Antar Pulau	1 misi dagang	-	misi dagang	0	misi dagang	0	misi dagang	0	1 misi dagang	1 misi dagang	100
	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan dalam Negeri	Jumlah Perdagangan antar Pulau	3308 Kali	3553	Kali	3360	Kali	3808	Kali	113,33	3360 Kali	19.595 Kali	592,35
	Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Operasi Pasar	3600 kali Operasi Pasar	178	Kali Operasi Pasar	17	Kali Operasi Pasar	25	Kali Operasi Pasar	147,06	110 Kali Operasi Pasar	462 Kali Operasi Pasar	12,83
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pelaku Usaha yang di awasi	120 Pelaku Usaha	40	Pelaku Usaha	110	Pelaku Usaha	125	Pelaku Usaha	113,64	110 Pelaku Usaha	325 Pelaku Usaha	270,83
	Penyelesaian pengaduan dan sengketa konsumen	Jumlah Penyelesaian Pengaduan Konsumen	80 kasus	12	-	60	Kasus	96	-	160	60 Kasus	115 Kasus	143,75
				(anggaran di refocusing, penyelesaian dengan mediasi)									



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja (akhir periode Renstra OPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020		Target dan Realisasi Kinerja					Target Program dan Kegiatan 2022 (RENJA OPD tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
						Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)						Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja OPD Tahun 2021		Realisasi Renja OPD Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra %
	Peningkatan Standardisasi Mutu Barang	Jumlah Sertifikat Mutu Barang	15 Sertifikat	8	sertifikat	3	Sertifikat	0	sertifikat	0	3 Sertifikat	21 Sertifikat	140
	Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Jumlah Pengujian standar Mutu Barang	3500 Kali	699	Kali	950	Kali	692	Kali	72,84	950 Kali	3450 Kali	98,6
	Penerapan Standardisasi Mutu Barang	Pelaku Usaha UKM yang menerapkan Standar Mutu Barang	123 Pelaku Usaha	13	pelaku usaha	30	pelaku usaha	32	pelaku usaha	106,67	30 Pelaku Usaha	93 Pelaku Usaha	75,60

Gorontalo. Juli 2022

KEPALA DINAS

RISHON SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 19690924198902 1 001



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kumperindag

Analisis kinerja pelayanan SKPD dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sesuai target Renstra Dinas Kumperindag Tahun 2017 – 2022 yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.11. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

No	Indikator	SPM/ Std Nas	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi & Perkiraan Capaian					Proyeksi Tahun	Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	11		13	14
Pelayanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
1	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah														
1	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif			658 Koperasi	668 Koperasi	678 Koperasi	693 Koperasi	708 Koperasi	717 Koperasi	840 Koperasi	866 Koperasi	907 Koperasi	957 Koperasi	728 Koperasi	
2	Jumlah UMKM Yang Dibina/Naik Kelas			20 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	50 UKM	20 UKM	60 UKM	70 UKM	50 UKM	75 UKM	50 UKM	
Pelayanan Urusan Pilihan															
II	Perdagangan														
3	Jumlah perdagangan antar pulau			2400 Kali	2640 Kali	2880 Kali	3120 Kali	3360 kali	2400 Kali	3033 Kali	3308 kali	3553 kali	3808 kali	3600 kali	
4	Jumlah Ekspor			6 Komoditi	7 Komoditi	8 Komoditi	9 Komoditi	10 Komoditi	6 Komoditi	7 Komoditi	8 komoditi	13 komoditi	10 komoditi	12 Komoditi	
5	Jumlah Sertifikasi Mutu Barang			3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	3 sertifikat	3 Sertifikat	12 sertifikat	3 Sertifikat	- Sertifikat	8 Sertifikat	-Sertifikat	3 sertifikat	
III	Perindustrian														
6	Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) yang dibina			14.339 IKM	14.539 IKM	14.739 IKM	14.939 IKM	15.139 IKM	14.025 IKM	14.886 IKM	15.000 IKM	15.226 IKM	15.555 IKM	15.339 IKM	

Gorontalo, Juli 2022

KEPALA DINAS

RISON SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 19670924198902 1 001



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pergub Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa tugas pokok Dinas Kumperindag sebagai pelaksana kewenangan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Kumperindag memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi dan Perdagangan;
6. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; serta
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian kinerja dan pelayanan, tentu masih dijumpai adanya kendala, tantangan atau hambatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD menunjukkan tingkat capaian kinerja pelayanan OPD sangat terkait dengan beberapa isu penting baik internal maupun eksternal, antara lain :

Isu-isu Internal :

1. Kualitas SDM aparatur. Kualitas SDM merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, karena ketersediaan SDM yang memiliki skil, keahlian dan pengetahuan terhadap pekerjaan akan sangat menentukan kualitas kebijakan dan pelayanan publik OPD. Kondisi SDM Dinas Kumperindag relatif cukup tersedia, berpengalaman, ahli dibidangnya dan memiliki tingkat responsibilitas yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Jabatan fungsional yang ada belum sesuai dengan bidang



pekerjaan yang digeluti dimana pejabat fungsional masih bekerja rangka antara tugas struktural dan fungsional. Bimtek peningkatan SDM bagi aparatur dan pejabat fungsional belum tersedia.

2. Iklim dan budaya kerja yang terbangun dilingkungan OPD. Ini merupakan salah satu faktor pendorong (positif) atau justru sebaliknya menjadi penghambat (negatif) dalam pencapaian kinerja OPD. Sejauh ini iklim dan budaya kerja dilingkungan Dinas Kumperindag cukup kondusif dalam mendukung pencapaian kinerja OPD, meskipun belum sepenuhnya optimal.
3. Sarana dan prasarana pendukung. Kedudukan sarana dan prasarana hampir sama pentingnya dengan ketersediaan SDM yang memadai. Kondisi sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Dinas Kumperindag masih sangat terbatas. Ruang kerja yang belum representative, ketersediaan peralatan laboratorium di UPTD BPSMB serta kendaraan operasional UPTD BPSMB
4. Koordinasi internal lintas Sub Dinas (Subdin) dalam OPD. Koordinasi merupakan sarana komunikasi yang efektif dalam sebuah organisasi. Koordinasi yang terbangun di lingkungan Dinas Kumperindag telah optimal, terutama dalam hal sinkronisasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan OPD. Nuansa ego sektoral tidak sampai pada level kritis yang bisa menghambat pencapaian kinerja OPD.
5. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan monev program lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Secara umum koordinasi yang terbangun relatif semakin baik, meskipun belum optimal.

Isu-isu Eksternal :

Isu-isu strategis di bidang Koperasi dan UMKM adalah Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi, Peningkatan Akses Pasar, Akses Permodalan, Peningkatan Kualitas SDM KUKM, Peningkatan daya saing UKM.

Perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Adapun Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi



- c. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM
- d. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.

Tantangan dalam pengembangan Koperasi UKM adalah :

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional
- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.
- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yang berkualitas dengan system manajemen pembagian tugas yang baik. Namun secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMKM masih rendah menjadikan tantangan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan.

UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya system pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Mayoritas UMKM belum menggunakan komputer dan belum memanfaatkan internet serta belum menjalin kemitraan dengan perusahaan besar atau dengan kata lain masih sedikit UKM yang naik kelas sehingga menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini.



Isu strategis di bidang perindustrian adalah Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan, Peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional, Pengembangan sentra dan kluster industri di daerah dan Penetapan Rencana Kawasan Industri Terpadu

Isu strategis di bidang perdagangan adalah

- a. Pelaksanaan operasi pasar
- b. Peningkatan infrastruktur
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen,
- d. Peningkatan Kapasitas SDM Petugas Pengawas Perdagangan,
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Pelaku usaha ekspor
- f. Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Standar
- g. Belum baiknya system distribusi barang dan jasa
- h. Masih rendahnya akses pasar luar negeri.

Hal ini ditandai dengan masih panjangnya rantai distribusi barang, tingginya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen dalam kondisi tertentu seperti pada saat hari besar keagamaan. Rendahnya akses pasar luar negeri merupakan dampak dari belum berkembangnya sistem informasi pasar termasuk rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam mengakses pasar luar negeri, baik dari sisi kuantitas dan kualitas produk, promosi dan pemasaran (termasuk *market intelegent*), kapasitas usaha, dan permodalan sehingga belum mampu mengakselerasi peningkatan ekspor komoditi unggulan daerah.

- i. Belum membaiknya system distribusi barang ini merupakan dampak dari jaringan distribusi yang belum tertata dengan baik (sarana pasar dan infrastruktur transportasi),
 - j. Belum transparannya ketersediaan pasokan di tingkat distributor dan agen,
 - k. Terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, pendingin) di tingkat produksi.
 - l. Kebijakan perdagangan antar pulau untuk mendukung peningkatan transaksi antar pulau yang belum sinergi baik antar provinsi maupun antar kawasan strategis di Sulawesi.
 - m. Masih lemahnya pengamanan pasar dalam negeri, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen.
- Keterbatasan dan refocusing anggaran berakibat tidak maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan di OPD sehingga target kinerja tidak optimal



Isu strategis di bidang Pelayanan SKPD adalah

- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik SKPD yang ditandai dengan keterbatasan SDM aparatur baik dari sisi jumlah maupun kualitas
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi,
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, evaluasi dan monev program baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kelembagaan SKPD.

Beberapa isu-isu penting tersebut diatas merupakan tantangan sekaligus peluang yang menjadi *starting point* sekaligus dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun berikutnya.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023

RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 yang sebelumnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025. RKPD tahun 2023 menjadi pedoman bagi organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, acuan bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) tahun 2023.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Kerja Pembangunan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023 yang dimulai 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Kumperindag berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Diskumperindag periode 2023-2026 yang telah disusun



dan direview atas pelaksanaan program dan kegiatan yang ada. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Strategis Dinas Kumperindag merupakan kebutuhan dan menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan.

Untuk tahun 2023, rencana pembangunan pemerintah pusat mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan penguatan pada 7 Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Adapun rencana pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tema “Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik”, dengan 4 (Empat) Unsur Tema sebagai penjabarannya, yakni:

- Peningkatan Ekonomi;
- Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo, maka ditetapkan tema dan unsur tema pembangunan untuk tahun 2023 adalah: *“Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik”*. Unsur-unsur tema RKPD Tahun 2023 :

- A. Peningkatan Ekonomi 1. Peningkatan nilai tambah sector pertanian dan pariwisata 2. Peningkatan Sarana Prasarana pertanian dan perikanan 3. Memfasilitasi kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja 4. Menjaga daya beli rumah tangga khususnya masyarakat miskin 5. Pembangunan Infrastruktur dasar dan strategis
- B. Peningkatan Sumber Daya Manusia 1. Peningkatan kualitas sarana prasarana Pendidikan 2. Peningkatan kualitas tenaga pendidik 3. Peningkatan sarana prasarana RS Ainun dan Labkesda serta SDM kesehatan 4. Pemenuhan layanan PMKS 5. Menjamin pemenuhan hak anak dan kapasitas ekonomi perempuan 6. Fasilitasi minat dan potensi pemuda 7. Pengembangan pengelolaan kebudayaan dan Agama
- C. Peningkatan Kualitas Lingkungan : 1. Rehabilitasi hutan dan lahan 2. Mewujudkan pengembangan pengelolaan persampahan dan limbah B3 3. Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan resiko bencana 4. Mendorong pembangunan yang rendah karbon
- D. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 1. Peningkatan kelembagaan dan proses bisnis yang lebih sederhana 2. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur 3. Pelayanan publik yang lebih berkualitas 4. Akuntabilitas kinerja dan



perencanaan, pengawasan yang handal 5. Peningkatan sarana prasarana layanan public untuk peningkatan PAD

Sebagai aktualisasi terhadap tema pembangunan daerah Tahun 2023, maka ditetapkanlah program dan kegiatan prioritas OPD dalam Rancangan RKPD Tahun 2023. Adapun hasil perbandingan antara program dan kegiatan dalam Rancangan RKPD Tahun 2023 dengan analisis kebutuhan yang tertuang dalam Renja Dinas Kumperindag Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program kegiatan pada renja 2023 adalah program kegiatan dalam upaya pencapaian target yang terdapat pada Renstra Tahun 2023-2026 dan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Kepmen 050 tahun 2020 dengan indikator pada RKPD dan Renstra OPD. Nomenklatur program pada tahun 2023 mengalami perubahan, mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.
2. Program dalam Renja Rancangan Awal 2023 berjumlah 11 Program, 21 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan sama seperti yang tercantum pada RKPD Provinsi gorontalo Tahun 2023.
3. Besaran anggaran pada RKPD 2023 sebesar Rp. 24.776.510.532- (dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) yang merupakan hasil review dan hasil analisis kebutuhan tahun 2023 termasuk gaji & tunjangan, sudah termasuk DAK. Adapun khusus Untuk Anggaran Program Kegiatan sebesar Rp. 15.250.529.679,- (lima belas milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Dimana anggaran ini telah melalui proses review Bappeda dan pembahasan tahap awal yang hanya sebesar Rp. 24.623.110.532,-
4. Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 24.776.510.532-- sudah termasuk Gaji Tunjangan serta DAK (turun 8,05 % dari Tahun 2022)
5. Pada Renja 2023 jumlah program/kegiatan bertambah dibanding tahun 2022 (11 program, 18 kegiatan) Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang bertambah di Tahun 2023 dan telah sesuai dengan RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah :
 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)



- a. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
3. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 - a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
 - b. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
4. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
 - a. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
 - a. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Verifikasi Mutu Produk
6. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
 - a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



Sehingga untuk penyusunan program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kumperindag Tahun 2023, maka dilakukan review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yang tertuang dalam tabel 2.12 tentang rencana program dan kegiatan prioritas Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Tabel 2.12 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023

Kode			Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
			Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	1		14,534,047,453	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan	1		14.534.047.453
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	340.000.200	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Sehat	20	Koperasi	340.000.200
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	1.654.646.500	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya	390	Orang	1.654.646.500
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Aktif	15	Unit Usaha	363.394.900	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Koperasi Aktif	15	Unit Usaha	363.394.900
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang berdaya saing	60	Unit Usaha	1.736.276.400	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang berdaya saing	60	Unit Usaha	1.736.276.400
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	20	Unit Usaha	869.766.900	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Provinsi Gorontalo	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha	20	Unit Usaha	869.766.900
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	1	Dokumen	187.454.386	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi	1	Dokumen	187.454.386



Kode			Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan							
			Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif		
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12	Laporan	993.772.192	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Provinsi Gorontalo	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12	Laporan	993.772.192		
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	6	Komoditi	298.488.341	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Provinsi Gorontalo	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor	6	Komoditi	298.488.341		
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	5	Dokumen	1.819.693.855	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Provinsi Gorontalo	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen	5	Dokumen	1.819.693.855		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	1	Dokumen	1.607.609.785	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri	1	Dokumen	1.607.609.785		
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dokumen	150.000.545	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Provinsi Gorontalo	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi	1	Dokumen	150.000.545		
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Provinsi Gorontalo	Pengelolaan sistem Informasi Industri Yang tersedia	1	Dokumen	221.359.075	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Provinsi Gorontalo	Pengelolaan sistem Informasi Industri Yang tersedia	1	Dokumen	221.359.075		
			Total						24.776.510.532	Total						24.623.110.532



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka perumusan program dan kegiatan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023, telah dilaksanakan forum perencanaan yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, baik Kementerian/Lembaga, SKPD Kabupaten/Kota, pelaku UMKM dan IKM. Forum perencanaan dimaksud antara lain Focus Group Discussion (FGD) Bidang Kumperindag. Forum SKPD Bidang Kumperindag Tingkat Provinsi Gorontalo. Forum SKPD Tingkat Provinsi Gorontalo dan Musrenbangda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Berbagai usulan stakeholder yang disampaikan dalam forum perencanaan tersebut telah ditampung, diolah dan disesuaikan nomenklaturnya untuk kemudian dituangkan kedalam usulan program dan kegiatan Renja 2023.



*Tabel 2.13 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo*

Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2 17 03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				
2 17 03 1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2 17 03 1.01 01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	20 Unit Usaha	Kegiatan ini diusulkan untuk penilaian koperasi berprestasi di Kab/Kota
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				
2 17 05 1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	390 Orang	Kegiatan ini diusulkan untuk pembinaan dan revitalisasi koperasi yang terdampak Covid-19
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				
2 17 06 1.01 01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	Kegiatan ini diusulkan sebagai upaya perluasan akses pasar & pembiayaan bagi KUKM terutama di masa pandemi covid-19
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	200 Unit Usaha	
2 17 07 1.01 02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Kabupaten/ Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	278 Orang	



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				
2 17 08 1.01 01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	30 Unit Usaha	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
3 30 02 1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi				
3 30 02 1.02 03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/ Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	
3 30 02 1.02	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				
3 30 02 1.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	8 Dokumen	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
3 30 04 1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				
3 30 04 1.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	
3 30 04 1.02 02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	4 Laporan	Kegiatan ini diusulkan untuk stabilisasi harga dan penurunan angka kemiskinan
3 30 04 1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				
3 30 04 1.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 Laporan	



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
3 30 05 1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				
3 30 05 1.01 03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha	
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				
3 30 06 1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
3 30 06 1.01 01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6 BPSK	
3 30 06 1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
3 30 06 1.02 01	Verifikasi Mutu Produk	Kabupaten/ Kota	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau	3 Komoditi	
3 30 06 1.02 02	Pengembangan Layanan Pengujian	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	100 Dokumen	
3 30 06 1.02 03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan Barang	2 Sertifikat	
3 30 06 1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				
3 30 06 1.03 01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
3 31 02 1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
3 31 02 1.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	12 Dokumen	
3 31 02 1.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 Dokumen	
3 31 02 1.01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	12 Dokumen	
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				
3 31 03 1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				



Kode	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
3 31 03 1.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Dokumen	
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				
3 31 04 1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				
3 31 04 1.01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten/ Kota	Data Informasi IKM	1 Sistem Informasi IKM	Pemenuhan data IKM

Gorontalo. Juli 2022
KEPALA DINAS

RISON SUNGE
Pembina Utama Madya
NIP. 19690924198902 1 001



BAB III

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi, maka Dinas Kumperindag melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Diskumperindag diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan di atasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan agar implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 dirumuskan berdasarkan kebijakan penyusunan rencana pembangunan daerah bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. RPD 2023-2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025. Periode akhir dalam tahapan RPJPD sangat penting dalam mewujudkan visi jangka panjang Gorontalo 2007-2025, yaitu **Gorontalo Maju dan Mandiri**. Perumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPD 2023-2026 mengacu pada upaya pencapaian visi misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007-2025 dimana terdapat misi yang menjadi penjabaran pencapaian visi RPJPD serta fokus-fokus pembangunan utama yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan ekonomi Gorontalo yang handal
2. Mewujudkan sumberdaya manusia Gorontalo yang handal
3. Mewujudkan pemerintahan daerah Gorontalo yang amanah

Masalah dan tantangan secara keseluruhan yang akan dihadapi Tahun 2023 masih cukup berat dan harus ditangani secara cermat agar memberikan hasil pembangunan yang optimal. Adapun permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi
2. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
3. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
4. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM.
5. Masih perlunya peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah dalam hal skill, manajemen usaha dan akses terhadap permodalan
6. Masih perlunya peningkatan produktivitas dan pemasaran produk IKM, baik pasar lokal, regional, nasional dan internasional
7. Masih perlunya pengembangan sentra dan kluster industri di daerah, untuk meningkatkan jumlah dan investasi di bidang industri
8. Belum ada kawasan Industri terpadu di Provinsi Gorontalo
9. Fluktuasi Harga Barang Kebutuhan Pokok



10. Tingginya Biaya Logistik
11. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait BPSK
12. Kurangnya intensitas pengawasan kegiatan perdagangan dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
13. Kurangnya fasilitas pengembangan produk potensial daerah
14. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur ekspor
15. Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium dan operasional BPSMB
16. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Dinas Kumperindag
17. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD
18. Belum memadainya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD
19. Masih rendahnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan monev program dan kegiatan SKPD.
20. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan lintas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Tantangan kedepan dalam upaya mengembangkan Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan :

- a. Sumber daya manusia (SDM), terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada pengelolaan koperasi yang belum menggunakan pendekatan manajemen usaha yang professional
- b. Kelembagaan, dari sisi kelembagaan koperasi khususnya pembentukan koperasi dan pembuatan akta, anggota maupun pengurus koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin masuk dalam lingkup bisnis yang lebih besar sebab harus berurusan dengan otoritas terkait, sehingga menurunkan motivasi dan kreativitas untuk mengembangkan kelembagaannya. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
- c. Pembiayaan, perluasan akses dan skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada sumber-sumber pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan eksternal yang lebih inklusif serta berbasis investasi.



- d. Produksi dan pemasaran, pada umumnya system produksi dan pemasaran koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok, dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat.

Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan masih bergelut pada masalah seperti :

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi.
- b. Rendahnya kepatuhan terhadap tata kelola manajemen kelembagaan dan usaha koperasi
- c. Rendahnya produktivitas, akses permodalan dan pemasaran produk KUKM.
- d. Rendahnya kualitas SDM terhadap pengelolaan, keterampilan dan kewirausahaan KUKM.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, menjaga stabilitas harga, serta langkah-langkah perluasan/pemerataan untuk mengurangi kesenjangan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Salah satu prakarsa baru sebagai pengungkit (*leverage*) bagi percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi nasional adalah Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI merupakan langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan termasuk 10 (sepuluh) negara besar di dunia pada tahun 2025.

Sejalan dengan MP3EI tersebut maka kebijakan nasional yang terkait dengan pembangunan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan (*pro-growth*), memperluas lapangan kerja (*pro-job*), menanggulangi kemiskinan (*pro-poor*) serta merespon persoalan-persoalan perubahan iklim (*pro-environment*). Aktualisasi dari kebijakan nasional tersebut antara lain :

- 1. Sasaran pembangunan industri nasional adalah peningkatan pertumbuhan industri pengolahan non migas. Untuk itu kebijakan industri untuk tujuan jangka pendek diarahkan pada pengamanan pasar domestik dari produk impor serta berbagai upaya harmonisasi tarif. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang diarahkan pada revitalisasi industri, penumbuhan klaster industri berbasis sumber daya alam, sumber daya manusia terampil, dan industri untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri yang difokuskan pada: (1) Revitalisasi industri, khususnya industri pupuk, industri gula, dan



revitalisasi berbagai rumpun (*cluster*) industri prioritas sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional; dan (2) Penumbuhan rumpun industri berbasis minyak sawit (*oleochemical*) serta rumpun industri berbasis kondensat minyak dan gas bumi.

2. Sasaran perdagangan internasional adalah meningkatnya angka pertumbuhan ekspor, dalam rangka meningkatkan akses pasar, Indonesia melakukan *multitrack strategy*, yaitu strategi diplomasi di fora multilateral, regional, dan bilateral, Melalui *multitrack strategy* ini. Indonesia telah berhasil memperkuat perannya di berbagai fora internasional, baik di forum WTO melalui G-20, G-33, dan NAMA 11, di forum ASEAN, ASEAN – Mitra dan Sub Regional ASEAN serta forum Bilateral.
3. Sasaran perdagangan dalam negeri adalah memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (*locally integrated. internationally connected*). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, dan mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) logistik.
4. Sasaran pembangunan koperasi dan UKM Provinsi Gorontalo 2023-2026 adalah :
 - a. Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat Mandiri dan Maju
 - b. Mewujudkan UMKM Naik kelas yang Berdaulat dan Mampu bersaing di pasar domestik dan global
 - c. Menyediakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM yang efektif
 - d. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM melalui program/kegiatan yang efektif, efisien, bermanfaat dan berkelanjutan
 - e. Menyelenggarakan pengendalian pengawasan kebijakan pengembangan koperasi dan UMKM
 - f. Mewujudkan profesionalisme aparatur sipil negara
 - g. Mewujudkan sistem data dan informasi pengembangan koperasi dan UMKM yang terintegrasi
 - h. Mewujudkan tata kelola pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang baik

Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut diatas. maka kebijakan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi Gorontalo diarahkan pada :

1. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dan pendampingan koperasi
2. Peningkatan Kapasitas Usaha, akses pasar, akses pembiayaan dan penataan manajemen usaha.



3. Pengawasan, Pemeriksaan, Pengendalian serta Penilaian Kualitas dan Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
4. Fasilitasi pembiayaan dan penguatan modal UKM, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Kelembagaan UKM
5. Digitalisasi promosi, perluasan pemasaran dan pengembangan UKM (Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia)
6. Peningkatan produktifitas UKM (produksi, pemasaran, kelembagaan, kerjasama dan kemitraan)
7. Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri (RPIP/RPIK) Tahun 2021-2041
8. Fasilitasi Perolehan Izin dan pengawasan Usaha Industri
9. Penyediaan Data Informasi Industri Berbasis Digital
10. Pengawasan dan Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok/Barang penting
11. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan/ tertib niaga/ barang beredar dan jasa serta rekomendasi ekspor
12. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, pengawasan kegiatan perdagangan/tertib niaga/barang beredar dan jasa serta promosi penggunaan produk dalam negeri
13. Pengembangan Pasar Tujuan Ekspor dan Optimalisasi Task Force Ekspor

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program/kegiatan dan pagu indikasi. Dalam pelaksanaannya, Renstra SKPD Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 akan menjadi pedoman bagi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dan OPD Kabupaten/Kota terkait dalam merumuskan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan OPD.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian

Sasaran :



Meningkatnya kapasitas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Jumlah),
Meningkatnya pertumbuhan Industri Kecil Menengah (persentase),
dan meningkatnya nilai ekspor (USD),

Indikator Kinerja Sasaran :

- d. Jumlah Koperasi Berkualitas
- e. Jumlah UKM yang berdaya saing
- f. Persentase Peningkatan Industri Kecil Menengah
- d. Jumlah Nilai Ekspor

Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

Penataan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan

Indikator Kinerja Sasaran :

Nilai SAKIP

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2023 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo yang tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Tahun 2023–2026 dan Rencana Pembangunan Daerah 2023–2026. Nomenklatur program pada tahun 2023 mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Sebagai aktualisasi dari Renstyra 2023-2026 dan RKPD 2023 maka program dan kegiatan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disusun dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indikator kinerja hasil program dan output kegiatan secara langsung mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.
2. Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam misi RPJPD 2007-2025. meliputi :
 - a. Mewujudkan ketahanan ekonomi Gorontalo yang handal;
 - b. Mewujudkan sumberdaya manusia Gorontalo yang handal; dan
 - c. Mewujudkan pemerintahan daerah Gorontalo yang amanah
3. Program dan kegiatan Dinas Kumperindag Tahun 2023 merujuk pada RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yang kemudian menjadi dasar dalam



penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026 yang disusun bersamaan dengan RPD, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023

- 4. Rumusan program dan kegiatan Dinas Kumperindag Tahun 2023 memiliki relevansi pencapaian dalam peningkatan ekonomi kerakyatan dan Kesetaraan Gender dimana program dan kegiatan Dinas Kumperindag diharapkan dapat mendukung pencapaian beberapa tujuan Kesetaraan gender, antara lain Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan . dengan target :
 - a. Upaya penurunan angka kemiskinan
 - b. Menciptakan kesempatan kerja dan pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda;
 - c. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan khususnya di bidang Koperasi, UKM/IKM
- 5. Program dan kegiatan Dinas Kumperindag merupakan bagian integral dari kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah. yang meliputi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, industri pengolahan, koperasi dan UMKM sebagai sektor riil penggerak ekonomi daerah.
- 6. Program dan kegiatan Dinas Kumperindag dititikberatkan pada upaya pemulihan ekonomi daerah dampak pandemic covid-19

Berikut diuraikan perbandingan program, kegiatan dan anggaran APBD T.A. 2021 dan Renja rancangan akhir OPD Tahun 2023.

Tabel 3.1. Perbandingan Jumlah Program Kegiatan dan Anggaran

URAIAN	JUMLAH			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
APBD T.A. 2022 (Termasuk DAK)	11	18	24	26.207.354.748
APBD TA. 2023 (Termasuk DAK)	13	21	29	24.776.510.532



Tabel 3.2. Perbandingan Program. Kegiatan dan Anggaran RKPD dan Renja 2023

URAIAN	JUMLAH			
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
RKPD 2023 (Termasuk DAK)	11	21	29	24.776.510.532
RENJA 2023 (Termasuk DAK)	11	21	29	24.776.510.532

Berdasarkan masukan dan pertimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka Program dan Kegiatan Renja Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program SKPD Tahun 2023 dan Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD 2026
Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
			Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan			100%		14.534.047.453			100%		17.026.912.612
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah					975.385.500					1.665.800.000
2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4	Dokumen	551.760.500			4	Dokumen	989.500.000
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6	Laporan	423.625.000			6	Laporan	676.300.000
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tunjangannya					9.672.375.853					10.306.112.612
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			87	Orang/ Bulan	9.525.980.853		87	87	Orang/ Bulan	10.106.112.612
2.17.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	Laporan	146.395.000		1	1	Laporan	200.000.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan			87	Orang	366.090.000			87	Orang	355.000.000
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			87	Orang	366.090.000			87	Orang	355.000.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan			30	Paket	1.920.057.000			30	paket	2.750.000.000
2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			30	Paket	1.920.057.000			30	Paket	2.750.000.000
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1	Laporan	1.600.139.100			1	Laporan	1.950.000.000



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
			Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1	Laporan	1.600.139.100			1	Laporan	1.950.000.000
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Sehat			20	Koperasi	340.000.200			20	Koperasi	412.000.000
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi			20	Dokumen	340.000.200			20	Dokumen	412.000.000
2.17.03.1.01.02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel			20	Unit Usaha	340.000.200			20	Unit Usaha	412.000.000
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah SDM Koperasi yang meningkat kapasitasnya			390	Orang	1.654.646.500			390	Orang	1.714.280.000
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			390	Orang	1.654.646.500			390	Orang	1.714.280.000
2.17.05.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			390	Orang	1.654.646.500			390	Orang	1.714.280.000
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi Aktif			15	Unit Usaha	363.394.900			20	Unit Usaha	550.000.000
2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			15	Unit Usaha	363.394.900			20	Unit Usaha	550.000.000



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
			Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
2.17.06.1.01.02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			15	Unit Usaha	363.394.900			20	Unit Usaha	550.000.000
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UKM yang berdaya saing			60	Unit Usaha	1.736.276.400			70	Unit Usaha	3.630.000.000
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UKM yang meningkat kapasitas dan kompetensinya			200	Unit Usaha	1.736.276.400			250	Unit Usaha	3.630.000.000
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan			200	Unit Usaha	530.576.200			250	Unit Usaha	1.550.000.000
2.17.07.1.01.02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan			278	Orang	1.205.700.200			318	Orang	2.080.000.000
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang bertransformasi usaha			20	Unit Usaha	869.766.900			30	Unit Usaha	7.100.000.000
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UMKM yang meningkat skala usaha menjadi usaha menengah			30	Unit Usaha	869.766.900			40	Unit Usaha	7.100.000.000



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
			Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi			30	Unit Usaha	869.766.900			40	Unit Usaha	7.100.000.000
	Jumlah Urusan Koperasi & UKM						19.498.132.353					30.433.192.612
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi dan Diawasi			1	Dokumen	187.454.386			1	Dokumen	610.000.000
3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			1	Dokumen	74.995.010			1	Dokumen	380.000.000
3.30.02.1.02.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission			1	Dokumen	74.995.010			1	Dokumen	380.000.000
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			8	Dokumen	112.459.376			9	Dokumen	230.000.000
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal			8	Dokumen	112.459.376			9	Dokumen	230.000.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah Laporan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			12	Laporan	993.772.192			12	Laporan	1.820.000.000



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
			Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			12	Laporan	841.236.182			12	Laporan	1.570.000.000
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			12	Laporan	159.817.410			12	Laporan	220.000.000
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			4	Laporan	681.418.772			4	Laporan	1.350.000.000
3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			12	Laporan	152.536.010			12	Laporan	250.000.000
3.30.04.1.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			12	Laporan	152.536.010			12	Laporan	250.000.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Komoditi Unggulan yang Diekspor			6	Komoditi	298.488.341			7	Komoditi	750.000.000
3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			6	Pelaku Usaha	298.488.341			7	Pelaku Usaha	750.000.000



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
			Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			6	Pelaku Usaha	298.488.341			7	Pelaku Usaha	750.000.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Produk yang Berstandar dan Peningkatan Perlindungan Konsumen			5	Dokumen	1.819.693.855			7	Dokumen	6.185.500.000
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen			10	Kasus	933.905.071			11	Kasus	2.020.000.000
3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif			6	BPSK	933.905.071			6	BPSK	2.020.000.000
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk			102	Dokumen	708.989.740			153	Dokumen	3.840.500.000
3.30.06.1.02.01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau			3	Komoditi	108.599.000			3	Komoditi	190.500.000
3.30.06.1.02.02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang			100	Dokumen	444.330.740			150	Dokumen	3.150.000.000
3.30.06.1.02.03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan			2	Sertifikat	156.060.000			3	Sertifikat	500.000.000
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Diawasi			30	Pelaku Usaha	176.799.044			40	Pelaku Usaha	325.000.000
3.30.06.1.03.01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi			12	Laporan	176.799.044			12	Laporan	325.000.000
	Jumlah Urusan Perdagangan						3.299.408.774					9.365.500.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Penerapan dan Evaluasi Pembangunan Industri			1	Dokumen	1.607.609.785			1	Dokumen	2.246.659.955
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			1	Dokumen	1.607.609.785			1	Dokumen	2.246.659.955




Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
			Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
3.31.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			12	Dokumen	597.863.900			12	Dokumen	803.972.482
3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			12	Dokumen	711.499.300			12	Dokumen	1.042.687.473
3.31.02.1.01.06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			12	Dokumen	298.246.585			12	Dokumen	400.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah izin yang difasilitasi & dievaluasi			1	Dokumen	150.000.545			1	Dokumen	175.000.000
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi yang terfasilitasi			1	Dokumen	150.000.545				Dokumen	175.000.000
3.31.03.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam Rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS, bagi : 1) Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan Industri Menengah yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri yang Merupakan PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			1	Dokumen	150.000.545			1	Dokumen	175.000.000



Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Lokasi		Target Capaian Kinerja	Pagu Usulan SKPD	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif		
			Kab/ Kota	Kec/Kel/ Desa								
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pengelolaan sistem Informasi Industri Yang tersedia			1	Dokumen	221.359.075			1	Dokumen	375.000.000
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			13	Dokumen	221.359.075			13	Dokumen	375.000.000
3.31.04.1.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			1	Dokumen	221.359.075			1	Dokumen	375.000.000
	Jumlah Urusan Perindustrian						1.978.969.405					2.796.659.955
	Total (Jumlah Urusan Koperasi & UKM + Perdagangan + Perindustrian)						24.776.510.532					42.595.352.567

- Total Anggaran ini belum termasuk DAK TA. 2023

Gorontalo. Juli 2022
KEPALA DINAS

RISON SUNGE
Pembina Utama Madya
NIP. 19690924198902 1 001



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo Tahun 2023

Program Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag. Rencana program prioritas, target beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo 2023-2026, selanjutnya dijabarkan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo dalam upaya pencapaian target RPD 2023-2026.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan, Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo.



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada RKPD Provinsi Gorontalo 2023 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Dimana RPD 2023-2026 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang terakhir dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2007 - 2025. Periode akhir dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2007 – 2025, yaitu **Gorontalo Maju dan Mandiri**.

Selanjutnya diuraikan kedalam tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dan dioperasionalkan melalui program dan kegiatan tahunan untuk selang waktu 2023 - 2026.

Dengan memperhatikan uraian pada Bab-bab sebelumnya, dan mempertimbangkan situasi terkini beserta peluang dan tantangan kedepan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo akan semakin berat. Karena di satu sisi, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dan dibenahi. Sedangkan disisi lain, ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo sangat terbatas, baik SDM, sarana prasarana dan pendanaan.

Menghadapi situasi tersebut. maka perlu dikembangkan langkah-langkah strategis guna mengatasi berbagai permasalahan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, yang juga sekaligus bisa menutupi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga roda pembangunan tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran SKPD dengan Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, sehingga dengan sinergi tersebut akan tercipta efisiensi sumberdaya namun tetap memiliki daya dorong yang kuat terhadap peningkatan kinerja sektor Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di daerah.



2. Mendorong partisipasi dan peran aktif sektor swasta dan BUMN dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yang disesuaikan dengan lingkup aktifitas dengan proporsi yang berimbang, sehingga partisipasi tersebut disamping meringankan tugas dan tanggungjawab SKPD, juga akan menghasilkan nilai tambah bagi usahanya dan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan instansi vertikal terkait perbankan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga donor, dan organisasi lainnya dalam rangka pemberdayaan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di daerah.
4. Penyempurnaan organisasi, revitalisasi program dan kegiatan serta indikasi anggaran Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo harus senantiasa diselaraskan dengan dinamika terkini dan proyeksi perkembangan pembangunan selang waktu 2023-2026
5. Ketersediaan anggaran dalam upaya pencapaian target kinerja dan pemulihan ekonomi pasca pandemic Covid-19
6. Ketersediaan Data UKM/IKM sangat dibutuhkan untuk membackup kegiatan yang akan di usulkan dan menjadi prioritas daerah

Semoga Dokumen Renja ini bisa menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi serta sarana sinkronisasi program pusat, provinsi, kabupaten/kota sekaligus menjadi alat ukur pencapaian kinerja Tahun 2023 dan RPD Tahun 2023 – 2026.

Gorontalo. Juli 2022

KEPALA DINAS

RISON SUNGE

Pembina Utama Madya

NIP. 19690924198902 1 001

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						19,498,132,353							30,433,192,612	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						14,534,047,453						17,026,912,612		
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						975,385,500						1,665,800,000		
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	551,760,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		4 Dokumen	989,500,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	423,625,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		6 Laporan	676,300,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9,672,375,853							10,306,112,612	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				87 Orang/ Bulan	9,525,980,853		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		87 Orang/ Bulan	10,106,112,612	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	146,395,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	200,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						366,090,000							355,000,000	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				87 Orang	366,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		87 Orang	355,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,920,057,000							2,750,000,000	
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	1,920,057,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		30 Paket	2,750,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,600,139,100							1,950,000,000	
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,600,139,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi		1 Laporan	1,950,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						340,000,200						412,000,000		
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						340,000,200						412,000,000		
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	Jumlah Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan Tersedianya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel				20 Unit Usaha	340,000,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		20 Unit Usaha	412,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						1,654,646,500						1,714,280,000		
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1,654,646,500						1,714,280,000		
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				390 Orang	1,654,646,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- PK2UKM		Peningkatan Ekonomi Daerah		390 Orang	1,714,280,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						363,394,900						550,000,000		
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						363,394,900						550,000,000		
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				15 Unit Usaha	363,394,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		15 Unit Usaha	550,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						1,736,276,400						3,630,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						1,736,276,400						3,630,000,000			
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan				200 Unit Usaha	530,576,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		200 Unit Usaha	1,550,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				278 Orang	1,205,700,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM				278 Orang	2,080,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						869,766,900							7,100,000,000		
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						869,766,900							7,100,000,000		
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				30 Unit Usaha	869,766,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		30 Unit Usaha	7,100,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						3,299,408,774							9,365,500,000		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						187,454,386							610,000,000		
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi						74,995,010							380,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3		30	02	1.02	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission				1 Dokumen	74,995,010		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Dokumen	380,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3		30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)							112,459,376							230,000,000	
3		30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				8 Dokumen	112,459,376		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		8 Dokumen	230,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3		30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING							993,772,192							1,820,000,000	
3		30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan							841,236,182							1,570,000,000	
3		30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				12 Laporan	159,817,410		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Laporan	220,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
3		30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				4 Laporan	681,418,772		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		4 Laporan	1,350,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						152,536,010						250,000,000		
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				12 Laporan	152,536,010		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Laporan	250,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						298,488,341							750,000,000	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						298,488,341							750,000,000	
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				6 Pelaku Usaha	298,488,341		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		6 Pelaku Usaha	750,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						1,819,693,855							6,185,500,000	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						933,905,071							2,020,000,000	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif				6 BPSK	933,905,071		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		6 BPSK	2,020,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						708,989,740							3,840,500,000	
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Jumlah Komoditi Potensial yang Dipantau				3 Komoditi	108,599,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		3 Komoditi	190,500,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang				100 Dokumen	444,330,740		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		100 Dokumen	3,150,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah Sertifikat Produk yang Diterbitkan				2 Sertifikat	156,060,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		2 Sertifikat	500,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						176,799,044						325,000,000		
3		30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi				12 Laporan	176,799,044	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Laporan	325,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1,978,969,405						1,992,687,473	
3	31	02				PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1,607,609,785						1,442,687,473	
3	31	02	1.01			Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						1,607,609,785						1,442,687,473	
3	31	02	1.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				12 Dokumen	597,863,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Dokumen	0	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				12 Dokumen	711,499,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Dokumen	1,042,687,473	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	02	1.01	06		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				12 Dokumen	298,246,585	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		12 Dokumen	400,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						150,000,545						175,000,000	
3	31	03	1.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						150,000,545						175,000,000	
3	31	03	1.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						150,000,545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah			175,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						221,359,075						375,000,000			
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						221,359,075						375,000,000			
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	221,359,075		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Daerah		1 Dokumen	375,000,000	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	
TOTAL											24,776,510,532								41,791,380,085	

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH										Formulir RKA-BELANJA SKPD				
Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023														
Organisasi : 2.17.3.30.3.31.27.0000 Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan														
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN														
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T				T + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				18,621,204,353	876,928,000	0	0	19,498,132,353	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				13,657,119,453	876,928,000	0	0	14,534,047,453	
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				975,385,500	0	0	0	975,385,500	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			551,760,500	0	0	0	551,760,500	
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			423,625,000	0	0	0	423,625,000	
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9,672,375,853	0	0	0	9,672,375,853	
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			9,525,980,853	0	0	0	9,525,980,853	
2	17	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			146,395,000	0	0	0	146,395,000	
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				366,090,000	0	0	0	366,090,000	
2	17	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			366,090,000	0	0	0	366,090,000	
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,043,129,000	876,928,000	0	0	1,920,057,000	
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,043,129,000	876,928,000	0	0	1,920,057,000	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,600,139,100	0	0	0	1,600,139,100	
2	17	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1,600,139,100	0	0	0	1,600,139,100	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				340,000,200	0	0	0	340,000,200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				340,000,200	0	0	0	340,000,200	
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			340,000,200	0	0	0	340,000,200	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				1,654,646,500	0	0	0	1,654,646,500	
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				1,654,646,500	0	0	0	1,654,646,500	
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM			1,654,646,500	0	0	0	1,654,646,500	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				363,394,900	0	0	0	363,394,900	
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				363,394,900	0	0	0	363,394,900	
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			363,394,900	0	0	0	363,394,900	
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				1,736,276,400	0	0	0	1,736,276,400	
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan				1,736,276,400	0	0	0	1,736,276,400	
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			530,576,200	0	0	0	530,576,200	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
2	17	07	1.01	02	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM			1,205,700,200	0	0	0	1,205,700,200	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				869,766,900	0	0	0	869,766,900	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah				869,766,900	0	0	0	869,766,900	
2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			869,766,900	0	0	0	869,766,900	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				3,241,880,774	57,528,000	0	0	3,299,408,774	
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				179,045,386	8,409,000	0	0	187,454,386	
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi				74,995,010	0	0	0	74,995,010	
3	30	02	1.02	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			74,995,010	0	0	0	74,995,010	
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				104,050,376	8,409,000	0	0	112,459,376	
3	30	02	1.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			104,050,376	8,409,000	0	0	112,459,376	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				980,047,192	13,725,000	0	0	993,772,192	
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				841,236,182	0	0	0	841,236,182	
3	30	04	1.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			159,817,410	0	0	0	159,817,410	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	30	04	1.02	02	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			681,418,772	0	0	0	681,418,772	
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				138,811,010	13,725,000	0	0	152,536,010	
3	30	04	1.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			138,811,010	13,725,000	0	0	152,536,010	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				298,488,341	0	0	0	298,488,341	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				298,488,341	0	0	0	298,488,341	
3	30	05	1.01	03	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			298,488,341	0	0	0	298,488,341	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1,784,299,855	35,394,000	0	0	1,819,693,855	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				898,511,071	35,394,000	0	0	933,905,071	
3	30	06	1.01	01	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			898,511,071	35,394,000	0	0	933,905,071	
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				708,989,740	0	0	0	708,989,740	
3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			108,599,000	0	0	0	108,599,000	
3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			444,330,740	0	0	0	444,330,740	
3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			156,060,000	0	0	0	156,060,000	
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				176,799,044	0	0	0	176,799,044	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	30	06	1.03	01	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			176,799,044	0	0	0	176,799,044	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1,944,464,405	34,505,000	0	0	1,978,969,405	
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1,607,609,785	0	0	0	1,607,609,785	
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				1,607,609,785	0	0	0	1,607,609,785	
3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			597,863,900	0	0	0	597,863,900	
3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			711,499,300	0	0	0	711,499,300	
3	31	02	1.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			298,246,585	0	0	0	298,246,585	
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				150,000,545	0	0	0	150,000,545	
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi				150,000,545	0	0	0	150,000,545	
3	31	03	1.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,545	0	0	0	150,000,545	
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				186,854,075	34,505,000	0	0	221,359,075	
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				186,854,075	34,505,000	0	0	221,359,075	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								T-1	T					T+1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
3	31	04	1.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			186,854,075	34,505,000	0	0	221,359,075	